Redaksi & Bisnis
Jl. Khatib Sulaiman No. 47
Padang, Sumatera Barat
Contact Person :
Telp. 0751-8952449
HP. 081363400050, 081267777345
Email :
redaksikhazanah@gmail.com
Media Online :
www.khazminang.id

1

Harian KHAZANAH
Menebar Kebaikan

DEWAN PERS
TERVERIFIKASI ADMINISTRASI & FAKTUAL
KHAZminang.id

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | KAMIS, 26 DZULHIJJAH1441 H

EDISI 629 TAHUN II | Rp. 4.500

PENGECATAN ULANG PESAWAT KEPRESIDENAN

Istana Dituding Ingin Hapus Jejak SBY

POLEMIK pengecatan ulang pesawat kepresidenan masih terus berlanjut dan menuai kontroversi. Selain dinilai menghambur-hamburkan uang di masa pandemi pengecatan ulang tersebut juga dinilai sebagai upaya menghapus jejak presiden keenam Soesilo Bambang Yudhoyono.

Banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan hal yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 itu.

Bahkan, pergantian warna pesawat itu dari biru dan putih menjadi merah dan putih dianggap bukan saja menghamburkan uang Negara yeyapi ada maksud politik di balik itu..

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengomentari rencana pengecatan pesawat Kepresidenan RI. Andi Arief menilai pengecatan pesawat itu ibarat lagu Peterpan berjudul 'Menghapus Jejakmu'.

BACA HAL-7

SOAL BANTUAN UNTUK LABOR FK-UNAND

Gubernur: "Sabar, Tetap Kita Bantu"

Selain di FK Unand, sampel swab Covid-19 juga dapat diperiksa di labor veteriner Bukittinggi

Padang, Khazanah-- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menjawab pertanyaan dari dua anggota DPRD Sumbar, Irwan Afriadi dan Nofrizon saat sidang paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 terkait viralnya donasi publik untuk laboratorium Unand.

"Permintaan Fakultas Kedokteran Unand untuk tahun 2021 baru masuk pada 4 Juli 2021. Permintaan tersebut kini sedang dibahas tim keuangan daerah berapa yang diminta dan berapa kemungkinan bisa disetujui," ungkap Mahyeldi saat paripurna penetapan RPJMD 2021-2026, Selasa (3/8) kemarin.

Terkait penggalangan donasi untuk setiap pengambilan hasil swab yang bersifat sukarela dan dikumpulkan untuk biaya consumables itu, Mahyeldi juga mempersilakan, karena itu memang kebiasaan orang Minang.

"Bila bantuan dikaitkan dengan

BACA HAL-7

'Melamar' di Agam, 2 Pejabat Solok Dicopot

Solok, Khazanah - Belum genap enam bulan menjabat sebagai Walikota Solok periode 2021-2026, Zul Elfian, SH, M.Si memberhentikan dua pejabat Pemko Solok dari jabatan tinggi pratama. Hal itu tertuang dalam Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-389-2021. Kedua pejabat yang diberhentikan itu adalah Drs. Dedi Asmar sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Drs. Asril, MM, sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Pencopotan ini, merupakan kali kedua setelah sebelumnya Zul Elfian juga mencopot Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Erlinda Syamsu Rahim, jelang Pilkada Kota Solok 2020 lalu.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Walikota Zul Elfian itu, terdapat dua pertimbangan yang menjadi alasan pemberhentian dua pejabat tersebut. Pertama, berdasarkan hasil seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di Kabupaten Agam, Dedi Asmar dan Asril lulus tiga besar. Kedua, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menggelar sidang pada 28 Juli 2021, membahas usulan pemberhentian pejabat itu, dengan Berita Acara nomor R.823/06/BPJK-2021.

Usai dicopot dari jabatannya, Dedi Asmar dan Asril ditempatkan sebagai staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemko Solok, dengan jabatan Analis Kemasyarakatan. Pencopotan Dedi Asmar dan Asril menjadi puncak dari "pengerdilan" dua pejabat tersebut. Setelah sebelumnya Dedi Asmar dan Asril dicopot kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) di OPD-nya masing-masing. Bahkan sebulan lalu, mobil dinas Asril BA 31 P, juga ditarik oleh Pemko Solok.

BACA HAL-7

Pandemi, Deflasi Padang dan Bukittinggi Membaik

Padang, Khazanah -- Deflasi Padang pada bukan Juli ini lumayan baik lantaran berada pada posisi rendah, tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi sebesar -0,09% (mtm), atau membaik dibandingkan realisasi Juni 2021 yang deflasi sebesar -0,17% (mtm).

"Secara spasial, pada Juli 2021, Kota Padang mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm), membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,16% (mtm). Sementara itu, Kota Bukittinggi tercatat mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm), membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang deflasi -0,26% (mtm)," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama kemarin.

"Secara tahunan inflasi Juli 2021 tercatat sebesar 1,79% (yoy), sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi Juni 2021 yang sebesar 1,74% (yoy). Sementara itu, secara tahun berjalan Januari s.d Juli 2021 Sumbar tercatat mengalami deflasi sebesar -0.02% (ytd), jauh lebih rendah dibandingkan realisasi Juni 2021 yang mengalami inflasi sebesar 0,07% (ytd). Realisasi inflasi tahun berjalan pada Juli 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan periode Juli tahun 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,30% (ytd)," sambung dia.

Wahyu menjelaskan, deflasi Sumbar pada Juli 2021 terutama didorong oleh deflasi pada kelompok transportasi dengan nilai deflasi sebesar -0,94% (mtm) dan andil -0,13% (mtm). Deflasi pada kelompok transportasi terutama bersumber pada penurunan tarif angkutan udara dan mobil dengan nilai andil deflasi masing-masing sebesar -0,11% (mtm); -0,03% (mtm). Tarif angkutan udara tercatat mengalami penurunan seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali dan PPKM lokal di beberapa wilayah

BACA HAL-7

Bandara Minangkabau sepi penumpangm, ikut dorong turunnya deflasi Padang

Mimbar

Optimistis dalam Pandemi

Oleh: **Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M.Si**

Marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang telah menimpa kita belakangan ini. Kita harus memahami bahwa kejadian yang menimpa penduduk bumi saat ini merupakan bagian dari paket penciptaan alam semesta itu sendiri. Sifat dari alam semesta adalah rusak dan menerima

BACA HAL-7

Syiar Islam

Masjid Agung Dharmasraya Ikon Islam di Negeri Tua

Masjid Agung hampir selesai dibangun

Pulau Punjung, Khazanah – Memiliki sebuah masjid tingkat Kabupaten atau menjadi sebuah masjid kabupaten, bagi semua daerah agaknya merupakan sebuah impian juga. Tidak sekedar sebagai ikon daerah, tetapi lebih kepada bagaimana syiar

BACA HAL-7

Ayat Hari Ini

"Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian."

(QS: Al-Baqarah: 143)

IKUT BRANDING DAERAH

Audy Joinaldy Dukung Mato Aia Jaya Farm

Padang, Khazanah -- Memiliki branding sendiri yang menonjolkan ciri kedaerahan. Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mendorong peternakan pembibitan (breeding) ayam kampung dan itik Mato Aia Jaya Farm di Pariaman.

"Usaha breeding ayam kampung dan itik masih jarang di Indonesia karena itu potensinya sangat besar untuk dikembangkan. Seharusnya dibuatkan badan hukum dan branding sendiri dengan meninjolkan sisi kedaerahan sehingga mudah dikenali oleh konsumen," katanya di Padang Pariaman, Rabu (4/8/2021).

Audy mengatakan, itu saat mengunjungi peternakan ayam kampung dan itik Mato Aia Jaya Farm yang telah menjadi supplier kawasan Sumatera di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

DITINJAU - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy saat meninjau peternakan pembibitan (breeding) ayam kampung dan itik Mato Aia Jaya Farm di Pariaman

Breeding bisa dilakukan melalui kemasan (packaging) yang menonjolkan sisi kedaerahan misalnya warna merah, kuning dan hitam. Sementara badan hukum sangat dibutuhkan untuk pengembangan. Dengan adanya badan hukum banyak keuntungan yang didapatkan termasuk kemungkinan pendanaan dari pihak luar.

Wagub Audy juga merekomendasikan badan hukum yang dibuat berbentuk PT, bukan CV. Hal itu berkaitan dengan keamanan aset pribadi jika dikemudian hari terjadi persoalan keuangan perusahaan.

Breeding ayam kampung dan itik masih belum banyak digeluti pengusaha karena itu tantangan untuk pemasaran sangat minim kalau dibandingkan dengan broiler.

Audy mengingatkan untuk melakukan pencatatan (recording) genetiknya dengan baik agar ke depannya kalau melakukan persilangan genetik atau menghasilkan genetik lokal bisa didaftarkan dan bisa diakui.

"Kalau nanti secara genetik digunakan ayam kampung asal Sumbar meski tidak mungkin 100 persen gen lokal, Pemprov Sumbar bisa ikut mempromosikan dalam pertemuan dengan kepala daerah provinsi lain," terangnya.

Wagub menyebut saat ini adalah saatnya pengusaha untuk berkolaborasi karena sangat sulit untuk menguasai sendiri usaha dari hulu hingga hilir. Karena itu ia menyarankan agar pemiliki usaha untuk tidak anti bekerjasama.

Pemilik Mato Aia Jaya Farm, Irwan mengatakan saat ini pihaknya sudah menjadi supplier untuk Sumatera dan berharap bisa terus berkembang.

Ia juga berharap bantuan dari pemerintah untuk membantu pihaknya agar bisa terus berinovasi dalam usaha breeding ayam kampung dan itik.

Di lokasi pembibitan ayam dan itik itu saat ini terdapat 5000 ekor ayam jenis KUB (kampung unggul bukan ras) yang merupakan persilangan antara ayam kampung dan ayam buras. Permintaan yang terbanyak saat ini adalah ayam jenis KUB tersebut.

Ikut hadir dalam kunjungan itu Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Kepala Dinas Peternakan Padang Pariaman dan Camat lubuk Alung.

■ **inoval agesly**

202 Mahasiswa UFDK Diwisuda

Bukittinggi, Khazanah - Rapat Terbuka Senat Universitas Fort de Kock (UFDK) Bukittinggi dalam rangka wisuda angkatan ke-29 dihadiri Wali Kota Bukittinggi Erman Safar. Pada acara tersebut, sebanyak 202 orang mahasiswa jenjang strata 1 dan strata 2 dari berbagai program pendidikan (Prodi) UFDK dikukuhkan sebagai wisudawan sebagai tanda telah berakhirnya rangkaian kegiatan akademik yang bersangkutan.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dalam sambutannya di hadapan peserta Rapat Terbuka Senat UFDK menyampaikan rasa bangga atas perjuangan dan kegiatan civitas akademika UFDK. "Terima kasih atas segala pengabdian (dalam) mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan segala bentuk usaha, baik dari (pihak) Yayasan dan Universitas, maka yang tadinya (Fort de Kock, red) sekolah tinggi, sekarang sudah berubah menjadi universitas. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memberikan support penuh bagaimana UFDK dapat semakin berkembang."

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar berpesan kepada para wisudawan, agar senantiasa menebar manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. "Dunia setelah kuliah akan jauh berbeda dari masa kuliah. Tidak ada waktu untuk santai santai. Tantangan kedepan lebih berat. Kita harus semakin semangat agar bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan," ucap Erman Safar.

Lebih lanjut Erman Safar juga menyebutkan isu kesehatan sangat penting saat ini, dengan keilmuan kesehatan yang dimiliki oleh wisudawan, terutama dalam masa pandemi saat ini, kesempatan tersebut semakin terbuka lebar. "Bahkan perusahaan-perusahaan membuka peluang, terutama karena pandemi Covid-19 yang telah lebih satu tahun kita jalani. Harapan utama tertumpu kepada wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan, terutama di bidang kesehatan," sebut Erman Safar.

Erman Safar juga mengharapkan civitas akademika UFDK menggiatkan penelitian terkait kesehatan masyarakat. "Pemerintah Kota Bukittinggi juga menunggu penelitian kesehatan masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota butuh kerjasama dan kontribusi dari kampus, yang sifatnya urgent dan perlu dimasukkan dalam kegiatan Pemerintahan," jelas Erman Safar.

Sementara itu Rektor Universitas Fort de Kock Evi Hasnita mengatakan, wisuda kali ini dilaksanakan secara daring dan luring. Evi menyebutkan, terlaksananya wisuda kali ini merupakan buah dari kerja keras, kerjasama, kerja cerdas dan kerja ikhlas wisudawan dan orang di sekeliling wisudawan.

Evi juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kesediaan Wali Kota Bukittinggi menghadiri acara wisuda UFDK. "Kehadiran Bapak Wali Kota memberikan support bagi Universitas Fort de Kock dalam upayanya menuju universitas berkelas dunia," terima kasih kepada Pemerintah yang sudah mensupport Universitas Fort de Kock menjadi bagian dari Bukittinggi Hebat, pungkas Evi Hasnita. ■ **Iwin SB**

RPJMD Bukittinggi 2021-2026 Disetujui jadi Perda

Bukittinggi, Khazanah- Rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi dengan agenda Nota Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (4/8) dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi, Ketua dan Wakil ketua serta anggota DPRD Kota Bukittinggi, Pj Sekda Kota Bukittinggi dan juga Forkopimda.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, setelah dihantarkan secara resmi oleh Wali Kota beberapa minggu lalu, DPRD melakukan pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus). Secara bertahap, pembahasan juga dilakukan bersama Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Alhamdulillah, beberapa hari lalu pembahasan selesai dilaksanakan. Hasilnya disampaikan hari ini oleh juru bicara pansus Syaiful Efendi dan juru bicara semua fraksi juga menyetujui ranperda RPJMD 2021-2026 ini," jelasnya.

Sementara itu juru bicara pansus RPJMD 2021-2026, Syaiful Efendi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan, pembahasan di internal Pansus DPRD Bukittinggi menghadirkan tim ahli yang menyusun rancangan teknokratik dari RPJMD. Pansus mencerna, mendengar dan menelaah pemaparan dari tim ahli. Pembahasan juga dilakukan terkait pemaparan visi dan misi Wali Kota, penekanan terkait dengan capaian target yang ingin dicapai untuk 5 tahun kedepan khususnya kerangka pendanaan dan belanja.

Setelah laporan Pansus, setiap fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi menyampaikan pemandangan akhir. Secara garis besar semua fraksi menyetujui ranperda RPJMD 2021-2026 dan memberikan beberapa masukan untuk Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sedangkan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pansus RPJMD yang telah membahas ranperda ini. RPJMD merupakan dokumen strategis dalam memberikan arah acuan, bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

"RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program walikota dan wakil wali kota, yang memuat tujuan, sasaran, strategi. arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun," jelas Wawako.

Visi Kota Bukittinggi 2021-2026, menciptakan Bukittinggi hebat, berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Visi itu dijabarkan dalam tujuh misi, hebat sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan dan hebat dalam sektor pertanian.

"Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021- 2026 telah dimulai dari tahun 2020, dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLKLHS) RPJMD. Selain itu juga telah dilakukan forum konsultasi publik (FKP) serta musrenbang RPJMD. Penyusunan RPJMD juga melibatkan tim ahli dari pascasarjana Unand," ujarnya.

Alhamdulillah hari ini kita menandatangani Nota Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Bukittinggi tentang RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026, yang merupakan tahapan penting dan memasuki tahapan akhir dalam penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026, pungkas Marfendi.

Setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi, selanjutnya menunggu evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan akan dimasukkan dalam lembaran Perda Kota Bukittinggi.

■ **Iwin SB**

Temui LaNyalla, Dubes AS Dukung Penguatan DPD RI

Jakarta, Khazanah - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim menyatakan mendukung upaya penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kim juga akan mendorong peningkatan kerjasama parlemen antara Senat AS dengan DPD RI. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara DPD RI dan Senat Amerika Serikat di Washington DC.

Demikian dikatakan Dubes Kim kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/8/2021). Dalam pertemuan itu, LaNyalla didampingi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan, Ali Ridho (Wakil Ketua BKSP), Maya Rumantir (anggota BKSP) dan Senator Bustami Zainudin serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Kepada LaNyalla, Kim menyatakan AS sangat berminat meningkatkan hubungan investasi dan perdagangan. Karena menurutnya, saat ini perusahaan di AS sangat tertarik berinvestasi di Indonesia, namun masih ada beberapa kendala dan hambatan serta perselisihan perdagangan.

"Kami senang dengan adanya terobosan Omnibus Law, dan kami sudah bekerjasama dengan kementerian terkait. Namun akan lebih baik jika kami juga mendapat dukungan dari DPD RI, terkait investasi kami di sejumlah daerah di Indonesia," tukas Kim seraya menyatakan keinginannya untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Atas hal itu, LaNyalla menyatakan kesiapan DPD RI untuk meningkatan hubungan kerjasama parlemen dengan Senat AS. LaNyalla juga berterima kasih atas dukungan AS terhadap upaya penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Kami akan mendorong Amandemen ke-5 Konstitusi Indonesia, dimana roadmap pembangunan Indonesia akan dipandu melalui Pokok-Pokok Haluan Negara. Kami DPD RI juga ingin membuka peluang adanya calon presiden dan wakil presiden dari non-partai politik atau independen," ungkap LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Joe Biden tentang potensi Jakarta akan tenggelam akibat perubahan iklim. Menurut LaNyalla, seharusnya Joe Biden juga menyampaikan upaya apa yang bisa diberikan AS agar Jakarta tidak tenggelam.

LaNyalla juga menyinggung soal Kerjasama Indonesia-AS dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Amerika Serikat yang telah mengirimkan bantuan sebanyak 3,5 juta dosis vaksin Moderna.

"Kami berharap bahwa komitmen bantuan pemerintah Amerika Serikat sejumlah US$14,5 juta untuk memberantas wabah corona ini akan tersalurkan dengan baik, termasuk bantuan peralatan ventilator dari Amerika Serikat," ucap LaNyalla.

Ketua DPD RI juga berharap pandemi Covid-19 membangkitkan semangat kedua negara untuk memperluas kerjasama di bidang riset farmasi dan kesehatan masyarakat, yang melibatkan Fakultas Kedokteran dan Farmasi serta lembaga-lembaga penelitian kedua negara. "Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah Covid-19 maka dunia akan bebas dari wabah semacam ini. Jadi hubungan bilateral kita ke depan perlu diberikan porsi yang lebih besar dalam bidang riset medis dan kerjasama industri kesehatan," imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu juga membahas sejumlah isu terkait hubungan kerjasama kedua negara. Di antaranya hubungan bilateral terkait pertahanan keamanan, industri strategis, ekonomi digital, lingkungan terkait perubahan iklim global, pendidikan menyangkut peningkatan jumlah pertukaran pelajar, maritim, kemanusiaan, profesionalisme dan upaya memerangi perdagangan narkoba. ■ **jer/***

BAGI MEREKA YANG TERDAMPAK PPKM

Darizal Basir Peduli Rakyat, Salurkan Ribuan Paket Sembako

Padang, Khazanah -: Mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode yang kini anggota Komisi I DPR RI, H. Darizal Basir menyalurkan bantuan dengan total delapan ribuan paket kebutuhan pokok untuk warga terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut didistribusikan secara bertahap selama masa pandemi Covid-19. Pada masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan keempat tahun 2020/ 2021, kembali disalurkan sebanyak 1.800 paket.

"Kami menyadari, kondisi warga saat ini sangat sulit karena terdampak pandemi Covid-19. Terlebih ketika diberlakuan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," kata Darizal Basir, Rabu (4/8/2021).

Politisi Demokrat itu menjelaskan, pengaruh Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat sangat luar biasa. Kemudian, pemerintah juga berupaya semaksimal mungkin menekan penyebaran melalui beberapa kebijakan, salah satunya adalah PPKM.

"Saat ini PPKM level 4 kembali diperpanjang, yang pastinya menambah dampak ekonomi kepada masyarakat, namun semua risiko itu harus diambil demi menyelamatkan rakyat dari penyebaran Covid-19 lebih luas," ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 ini menambahkan, apresiasi terhadap pemerintah yang telah menyalurkan berbagai bantuan sosial. Dia berharap bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan merata sehingga dapat meringankan beban ekonomi yang saat ini dialami masyarakat.

Dia menambahkan, selama masa pandemi Covid-19 dia juga ikut memberikan bantuan. Total delapan ribuan paket telah disiapkan, dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Hal itu sebagai bentuk komitmennya membantu masyarakat.

"Saya sebagai anggota legislatif juga turut peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 yaitu dalam bentuk penyaluran bantuan sembako," katanya.

Disebutkan, bantuan sembako yang disalurkan pada masyarakat terdampak Covid 19 itu merupakan amanah dan sejalan dengan kebijakan partai dengan motto "Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat".

"Ya, apa yang kita lakukan dalam masa Pandemi Covid-19 ini adalah amanah, dan sejalan dengan kebijakan Partai Demokrat dalam rangka gerakan nasional peduli berbagi," ucapnya.

Disebutkan, dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 sejauh ini masih terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian semua pihak menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

"Semoga wabah Covid-19 cepat berlalu dan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat kembali pulih. Saya juga meminta semua pihak agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19," ajaknya.

Wartawan Pun Terdampak

Bantuan H. Darizal Basir juga diberikan untuk wartawan. Menurutnya, wartawan juga merupakan profesi yang merasakan dampak ekonomi.

BERSIAP BERANGKAT - Mobil yang membawa sembako sumbangan mantan Bupati Pesisir Selatan H. Darizal Basir siap mengunjungi para terdampak PPKM

"Semua terdampak, tak terkecuali wartawan. Selama pandemi selalu intens menyajikan informasi kepada masyarakat, berkontribusi besar dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Darizal.

Sebanyak 75 paket sembako diserahkan anggota Komisi I DPR RI itu melalui tenaga ahlinya Suherman. Bantuan diterima perwakilan wartawan, Adrian Tuswandi untuk disalurkan kepada wartawan di Kota Padang.

"Mewakili kawan-kawan, kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian anggota DPR RI H. Darizal Basir kepada insan jurnalis. Ini sebuah perhatian luar biasa kepada kami," kata Adrian.

Didampingi beberapa orang wartawan, antara lain Novrianto, Nofal Wiska, Almudasir, Febry Chaniago, Yuliadi Chandra dan lainnya, Adrian menyampaikan amanah penyaluran bantuan tersebut.

"Insyaallah, segera kami salurkan, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wata'ala dan wabah pandemi Covid-19 segera berlalu," tekad Adrian.

Bantu UMKM dan Beasiswa

Selain delapan ribuan paket sembako, selama masa pandemi Covid-19, H. Darizal Basir juga memberikan perhatian kepada beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan beasiswa bagi anak-anak sekolah.

Sektor UMKM yang terdampak juga perlu mendapat perhatian. Selain itu, pendidikan anak-anak kurang mampu juga harus tetap diselamatkan. Darizal menegaskan, Partai Demokrat tetap konsisten kepada perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

"Meskipun kami tidak mampu menampung semuanya, namun kami ingin ikut berkontribusi dengan membantu beberapa pelaku UMKM dan beasiswa, dan berharap pemerintah serta para dermawan yang lain juga bahu membahu sehingga seluruh masyarakat bisa terbantu," ucapnya.

Darizal Basir yakin, dengan bahu membahu, bersama-sama, dampak pandemi Covid-19 bisa diatasi. Dia tetap mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. ■ **jer/**

Inti

Polemik Pengumuman Laboratorium Unand

Sejak Tiga hari belakangan, media massa baik online maupun cetak dihebohkan dengan pengumuman Laboratorium Unand tentang penggalangan donasi secara sukarela untuk setiap pengambilan hasil swab untuk biaya barang-barang plastic seperti filter tip, tabung dan cup-cup(*consumables)*, buntut dari tidak adanya bantuan dari Pemprov Sumbar.

Pengumuman itu berbunyi: "Mengingat belum adanya pendanaan dari Pemprov Sumbar, maka kami mohon donasi untuk setiap pengambilan swab yang dilakukan di FK Unand, untuk biaya *consumables*. Donasi tidak memaksa dan tidak ada ketentuan jumlah, terimakasih".

Buntutnya, sejumlah WA Grup langsung menggalang donasi untuk membantu labor yang sangat penting untuk pengendalian Covid-19 di Sumbar itu. Bahkan akademisi Unand Dr. Sari Lenggogeni membuka fundrising untuk itu.

"Ibo kita, labor itu bekerja 24 jam sudah banyak para pekerjanya terpapar Covid-19, tapi perhatian pemerintah di Sumbar tidak ada, sudah 7 bulan insentif dan bantuan lain tak dibayarkan bagaimana itu?," ujar netizen Ilham Azre di whatsapp group TOP100, yang dikutip oleh situs *harianindonesia.id* kemarin.

Para inisiator dan anggota GWA yang sejak awal pandemi mengawal penanganan Covid-19 Sumbar itu, terdiri dari para akademisi, politisi, profesional, tokoh masyarakat, kepala daerah dan jurnalis.

Walikota Pariaman, Dr. Genius Umar juga tak kalah sigap memberi perhatian kepada Labor FK Unand itu. Dia mengajak para kepala daerah untuk urun rembug membantu pendanaan operasional labor penting itu.

Dua anggota DPRD Sumbar, Irwan Afriadi dan Nofrizon sampai mempertanyakan hal itu saat sidang paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Namun, Gubernur Mahyeldi, membantah tak membantu Labor FK Unand.Menurutnya, permintaan Fakultas Kedokteran Unand untuk tahun 2021 baru masuk pada 4 Juli 2021 dan permintaan tersebut kini sedang dibahas tim keuangan daerah berapa yang diminta dan berapa kemungkinan bisa disetujui.

Dan terkait bantuan untuk laboratorium yang viral itu, Gubernur Mahyeldi mengaku sudah bertemu dengan Rektor Unand, Yuliandri, dan dijelaskan mekanisme dan segala sesuatunya agar bisa dipahami.

"Saya sebagai gubernur bukan malaikat, juga manusia biasa pasti ada kekurangan-kekurangan. Kami tidak akan komentari berita-berita viral karena pekerjaan kami bukan mengomentari tapi menjawab dengan kerja," ulas Mahyeldi.

Namun anggota DPRD Sumbar, H. M Nurnas mengaku takjub dengan jawaban dan respon Gubernur Sumbar, karena terdapat kata 'malaikat' dan menyebut tugas gubernur tidak menjawab berita viral. Dengan sedikit menyindir, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar itu menyatakan bahwa memang benar Mahyeldi itu bukan malaikat.

"Setuju saya dengan uraian Pak Mahyeldi di Paripurna tadi, dua catatan saya memang betul gubernur tidak malaikat. Kedua, soal tugas gubernur tidak menjawab berita viral, semoga saya dan DPRD Sumbar tidak gagal paham memaknainya," ujar H. M Nurnas.

Gubernur memang bukan malaikan. Namun tidak menjawab berita viral yang jelas-jelas mempertanyakan sikap dan kinerja gubernur, tentu saja membuat anggota dewan, terutama H. M. Nurnas heran dan berharap gubernur tidak gagal paham memaknainya. Di kalimat itu sangat dalam sekali maknanya.

RUNDO

Labor Unand menggalang donasi disebabkan tidak adanya donasi untuk *consumables*
Dan terjadilah "badoncek"............

Gubernur Sumbar Mahyeldi membantah keras tudingan kalua dia tidak membantu Labor Unand
Tunggulah dulu.....

Bupati Pasaman Barat mengancam akan menutup operasional PT. BSS
Nan idak namuah patuah tu, langkang se pak bupati....

Harian KHAZANAH

Penerbit :
PT KHAZANAH MULTIMEDIA UTAMA
KepMenkumHAM No. AHU.0808900.AH.01.01 tahun 2019
Dewan Pers Terverifikasi Administrasi & Faktual No. 452/DP-Verifikasi/K/X/2019

Penasehat : H. GAMAWAN FAUZI
Direktur Utama : EKO YANCHE EDRIE
Dewan Redaksi : H. GAMAWAN FAUZI (ketua), EKO YANCHE EDRIE, FAISAL BUDIMAN, ALWI KARMENA, JOHN EDWARD RHONY, NOVRIZAL SADEWA, KABATI, NASRUL AZWAR

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : EKO YANCHE EDRIE
Pemimpin Perusahaan : FAISAL BUDIMAN
Redaktur Pelaksana I : JOHN EDWARD RHONY
Redaktur Pelaksana II/Koordinator Liputan : RYAN SYAIR
Sekretaris Redaksi : DEVIE DIANY

Redaktur Senior : ALWI KARMENA, SYAFRUDDIN AL
Redaktur : FEBRIANSYAH FAHLEVI, NOVRIZAL SADEWA
Reporter Padang : RAIHAN ALKARIM, MURDIANSYAH EKO, RINA AKMAL, Pariaman : SYAFRIAL SUGER, Padangpanjang : PAUL HENDRI, Payakumbuh/Limapuluh Kota : LILI YUNIATI, Bukittinggi : IWIN SB, Agam : HEPPY KUSNANDAR, IRWANDI, Pasaman Barat : ALTAS SP, RONI MANGKUTO, Pasaman : ZULKIFLI RAHMAN, YUNEFRIZAL, Tanah Datar : HERI SYAHRIANTO, Pesisir Selatan : MIL HENDRAWANDI, WANDI JUSRI, JUMADIL, Solok Selatan : HELFI YULINDA, Solok : RISWAN JAYA, RIJAL ISLAMY, Sawahlunto : YUDHA AHADA, Sijunjung : SAHARI FITRA, DASRUL RIDWAN, Dharmasraya : A.HABIBIE, Mentawai : ERIK VIRMANDO, Jabodetabek : SYAFRUDDIN AL

Manajer Bisnis : JEJENG AZWARDI, Staf Adm/Keuangan : RATNA PUTRI, IRA DIRYANTI, Sirkulasi : YULIA HENDRA, SYAFRIL, Staf Layout : ALHAMDI, BUDI FEBRIAN, SENGKI HANUR P, Staf IT : RAIHAN ALKARIM, Marketing : TOMMY (Koord), MARLIM, JONI, IRFAN

Harga Langganan : Kota Padang @Rp120.000/bulan, Luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, Harga Eceran : @Rp4.500/eksemplar
Tarif Iklan : Baris (BW) Rp25.000/baris, Kolom (BW) Rp7.500/mmk, (FC) Rp10.000/mmk, Display (BW) Rp7.500/mmk, (FC) Rp10.000/mmk, (FC Hal 1) Rp15.000/mmk, (FC Hal 8,9,12) Rp12.500/mmk, Advetorial/Pariwara : (BW) Rp6.000.000/ 1 hal, (FC) Rp7.000.000/1 hal

Alamat Redaksi & Bisnis :
Khazanah Building, Jl. Khatib Sulaiman No. 47 A Padang, Sumatera Barat
Telp. 0751-6952449, Email : redaksikhazanah@gmail.com
Narahubung : 081363400050 (Jejeng), 081267777345 (Faisal),
Media Online : www.khazminang.id

Dicetak pada : PT Padang Graindo Mediatama, Jl. Adinegoro No. 17 Padang
Isi di luar tanggung jawab percetakan

OPINI

Hak Sosial Orang Sakit Menghadapi Mafia Covid-19

OLEH: **A MARGANA**

Di tengah pandemi covid-19, muncul sejumlah mafia. Mereka mengambil kesempatan untuk menangguk untung sebesar-besarnya dari orang sakit atau penderita covid-19. Salah satunya ialah mafia alat kesehatan (alkes) yang membuat peralatan menjadi langka di pasar. Dengan kelangkaan itu, mereka bisa mendongkrak harga gila-gilaan. Karena itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Irman berniat menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menggulung mafia alkes tersebut (Media Indonesia, 28/7). Perilaku mereka memang di luar nalar sehat karena sengaja memainkan pasar dengan menciptakan situasi kelangkaan alat kesehatan agar bisa mematok harga tinggi. Setelah oksigen tersedia cukup di pasar, misalnya, kini pedagang memainkan harga tabung. Harga tabung ukuran 1 meter mereka jual dengan harga Rp2,5 juta. Padahal, harga sebelum pandemi cuma Rp300 ribu. Menurut laporan, polisi telah membongkar beberapa kasus penimbunan tabung oksigen itu. Penderita covid-19 yang meninggal pun sempat dilaporkan menjadi 'sasaran' mafia kremasi. Dengan narasi terjadi antrean panjang berhari-hari menunggu proses perabuan di krematorium, mereka mendongkrak harga gila-gilaan. Tarif kremasi normal di sejumlah krematorium swasta berada pada kisaran Rp8 juta sampai Rp15 juta. Namun, di tangan mafia itu, tarifnya didongkrak menjadi Rp80-an juta. Sebelum terjadi krisis tabung oksigen dan kremasi, sempat terjadi kelangkaan obat covid-19 dan harganya pun melejit. Seolah ini sebagai trik pedagang yang menumpuk obat tersebut agar bisa mengerek harga lebih tinggi lagi di tengah permintaan obat pasien covid-19 yang meledak sejak awal Juli lalu. Ledakan pasien bukan hanya yang dirawat di rumah sakit, melainkan juga mereka yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Lonjakan jumlah pasien dan isoman ini menjadi sasaran empuk para pedagang untuk memainkan harga. Untuk mengatasi mafia obat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan pembatasan harga atau HET (harga eceran tertinggi) 11 jenis obat covid-19 dalam masa pandemi, Sabtu (3/7). Sebelum pembatasan harga obat yang baru dari Menkes tersebut, sebenarnya sudah ada HET yang tertulis di kemasan tiap obat. Oseltamivir, misalnya, HET-nya tertulis Rp20.185 per kapsul. Namun, ketika terjadi 'krisis obat' pandemi, obat jenis itu dijual di pasar dengan harga Rp50 ribu–Rp60 ribu. Kini, pemerintah menetapkan HET baru Rp26 ribu. Untuk favipiravir 200 mg yang sempat dipasarkan antara Rp80 ribu dan Rp85 ribu per tablet, pemerintah memangkasnya dengan HET menjadi Rp22.500. Azithromycin dijual Rp17.500-Rp20.000. Berdasarkan HET terbaru jenis ini, harganya Rp1.700 per tablet. Ivermectin 12 mg, yang lagi naik daun, beberapa hari ini justru sulit ditemukan di pasar. Kalau toh ada, harganya di atas Rp250 ribu-Rp300 ribu per setrip atau Rp25 ribu per tablet. Pemerintah menetapkan HET obat cacing yang diyakini ampuh untuk covid-19 itu Rp7.500 per tablet atau Rp75 ribu per setrip. Agar obat covid-19 tidak melejit, 11 jenis obat untuk covid-19 dikendalikan. Penetapan HET merupakan kebijakan pemerintah untuk menjinakkan harga obat. Bahwa obat tidak bisa diperdagangkan dengan mekanisme pasar bebas seperti barang kebutuhan yang lain. Produsen dan pedagang tidak bisa sesuka hati menaikkan harga obat agar bisa mengeruk untung besar.

Orang sakit, konsumen kepepet

Orang sakit yang mencari obat secara harafiah memang boleh dibilang sebagai konsumen. Artinya, kalau diartikan seperti itu, orang sakit mendapatkan perlindungan sebagai konsumen seperti tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen (1999). Para produsen dan penjual obat dalam kasus melejitnya harga obat belakangan ini memperlakukan orang sakit sesuai dengan peraturan hukum itu, yaitu sebagai konsumen barang. Menurut UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat (Pasal 1 butir 2). Orang sakit yang mencari obat atau tabung oksigen, atau korban meninggal akibat covid-19 yang mencari krematorium atau permakaman, bisa disebut sebagai konsumen. Namun, tampaknya sudut pandang itu terlalu sempit untuk mengatakan orang sakit atau orang mati sebagai konsumen, seperti konsumen barang-barang lain dalam aturan pasar bebas. Orang sakit, apalagi penderita covid-19 yang jumlahnya meledak selama Juli ini, sebenarnya konsumen yang kepepet. Mereka terpaksa harus mendapatkan obat untuk kesembuhan sebagai penderita. Mereka juga kepepet harus membeli tabung dan oksigen untuk menolong penderita yang sulit bernapas. Untuk orang meninggal yang memerlukan permakaman atau kremasi juga mendesak untuk segera dimakamkan atau diperabukan. Baik pihak pabrik obat, distributor atau pedagang obat, maupun penyelenggara kremasi memang punya alasan untuk memandang mereka sebagai konsumen. Bisnis obat menghitung untung rugi dan mengikuti mekanisme pasar. Kalau permintaan meningkat dan suplai terbatas, harga pun naik. Demikian pula tabung oksigen dan jasa kremasi. Namun, ada batas yang jelas untuk wacana tentang orang sakit sebagai konsumen.

Masalahnya, hubungan orang sakit dan obat atau jasa itu tidak sama dengan hubungan konsumen dan barang yang dipasarkan dalam ekonomi pasar bebas. Ada perbedaan mencolok. Orang yang tampil sebagai konsumen dapat memilih tempat berbelanja atau memilih tipe barang apa yang akan dibelinya dan banyak alternatif di pasar. Dalam mekanisme pasar, konsumen bebas memilih dan menentukan dalam membeli barang dan bisa menawar. Ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Orang yang mau membeli sepeda motor merek tertentu, misalnya, bisa memilih sesuai dengan selera dan uang di kantong. Tipe, warna, ukuran mesin, dan lain-lain bisa dipilihnya. Bahkan, kalau barang yang tersedia di suatu toko belum sesuai dengan seleranya, konsumen bisa menunda membeli atau mencari merek lain yang lebih cocok atau bisa juga menunda atau membatalkan membeli sepeda motor itu. Orang sakit tak punya banyak pilihan dan tidak menikmati kebebasan sebagai kosumen di pasar. Seperti kasus pasien covid-19, mereka perlu segera mendapatkan obat. Kalau tidak cepat memperoleh obat, dia bisa mati. Obat yang dicari juga terbatas, tidak banyak pilihannya. Bahkan jenis obat yang akan dibeli sudah ditetapkan dalam resep dokter. Jadi, orang sakit tidak memiliki kebebasan memilih seperti konsumen dalam pasar bebas. Orang sakit tidak bisa disejajarkan sebagai konsumen barang kebutuhan. Orang sakit memiliki kemendesakan untuk memperoleh obat. Pasien membutuhkan oksigen karena napasnya sudah sesak. Kalau tidak segera mendapatkan obat atau oksigen, ada ancaman atau risiko kematian.

Hak sosial orang sakit

Setiap orang sakit pada dasarnya punya hak untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit atau mendapatkan obat. Hak itu dalam ilmu etika disebut sebagai hak sosial. Orang sakit harusnya bisa mendapatkan obat dengan harga yang wajar untuk kesembuhan sakitnya. Hak sosial itu perlu dijamin ketentuan publik atau diatur sedemikian rupa agar setiap orang yang sakit bisa mendapatkan obat dengan mudah dan dengan harga yang wajar. Ketentuan HET obat covid-19 seperti disebut di atas boleh dibilang sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak sosial bagi orang sakit. Pengaturan dari pemerintah itu dimaksudkan agar produsen dan pedagang obat tidak memberlakukan obat sebagai consumers goods yang bisa diperdagangkan di pasar bebas. Pengusaha dan pedagang obat memang berhak mendapatkan keuntungan. Namun, tidaklah etis kalau mereka memanfaatkan kemendesakan orang sakit dengan melejitkan harga obat sesuka hati menangguk keuntungan. Mungkin pemerintah layak memikirkan untuk melindungi hak sosial dari orang sakit, seperti dalam kasus pasien covid-19 dalam masa PPKM darurat kali ini. Mereka tiba-tiba dicekik harga obat yang gila-gilaan dan dipermainkan dengan 'menghilangkan' obat di pasar. Pemerintah diharapkan bisa merumuskan ketentuan agar para pelaku usaha dan pedagang obat-obatan tidak berperilaku seperti pedagang barang kebutuhan bagi konsumen umum. Ancaman akan mencabut izin usaha atau menggulung mafia-mafia obat, tabung oksigen, atau kremasi hanyalah gertakan sesaat. Selain penetapan HET dan pengawasan pelaksanaannya, perlu ada ketentuan tentang tata niaga yang mampu melindungi posisi orang sakit. Tata niaga itu tentu tidak mengacu pada permainan pasar bebas karena orang sakit tidak memiliki keleluasaan sebagai konsumen. Pasien harus segera mendapatkan obat tertentu atau oksigen. Orang meninggal harus segera dimakamkan atau diperabukan. Tak ada kebebasan seperti konsumen barang lainnya. Keputusan memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang melakukan isoman dengan telemedicine juga merupakan upaya untuk meredam gejolak harga obat saat ini. Apalagi, pemerintah akan memberikan obat covid-19 secara gratis bagi peserta isoman yang mendapat pelayanan telemedicine. Orang sakit secara moral mempunyai hak sosial untuk bisa sembuh, mendapatkan pelayanan obat dan alkes dengan mudah serta harga yang wajar. Perlu penataan tata niaga obat dan alkes yang memadai untuk melindungi hak sosial orang sakit. (*Penulis adalah Wartawan, Pegiat Komunikasi Sosial, Anggota Komisi Komsos KWI*) ■ Sumber: mediaindonesia.com

Partai Politik Bukan Pengendali Sains

OLEH: **FAJRI SIREGAR**

Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kabar yang cukup mengejutkan. Kurang lebih dua tahun terakhir, publik sudah mengetahui bahwa pemerintah akan mendirikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diharapkan menjadi pil ampuh untuk menggenjot inovasi di Indonesia.

Di tengah pembentukan badan tersebut, komunitas ilmuwan dan akademisi tidak terlalu yakin harus bersikap seperti apa dalam memandang masa depan sains nasional. Di satu sisi, ada asa bahwa BRIN bisa mengakselerasi rencana-rencana besar yang disusun di atas landasan sains dan pengetahuan. Di sisi lain, keberadaan BRIN justru mempertaruhkan posisi banyak peneliti, terutama ASN, yang nasibnya tidak menentu lantaran rencana penyatuan lembaga penelitian pemerintah di bawah BRIN itu sendiri. Ketika semua desas-desus tersebut tidak terjawab, kejutan justru hadir dengan dileburnya Kemenristek ke dalam naungan Kemendikbud, yang sudah kocar-kacir menambal sulam pendidikan nasional, terlebih selama pandemi.

Ada satu pihak yang tidak pernah kaget dengan semua rencana tersebut. Pihak inilah yang pertama kali secara terang-terangan mendorong munculnya lembaga bernama BRIN. Dalam berbagai kesempatan, partai pemenang pemilu 2019, PDI-P dikabarkan terinspirasi oleh efektivitas lembaga seperti Chinese Academy of Sciences yang menata pemanfaatan sains dan teknologi dengan pendekatan sentralistik. Sejak terilhami keberadaan lembaga tersebut, partai berkuasa di Indonesia pun getol menyampaikan ide-idenya melalui Undang Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah disahkan pada 2019.

Sejak itu, berbagai pemangku kepentingan sains dan IPTEK rajin berdiskusi mengenai bentuk ideal BRIN dan penataan kelembagaan yang efektif agar menguntungkan semua pihak. Organisasi perwakilan ilmuwan seperti ALMI (Akademi Ilmuwan Muda Indonesia) sebenarnya sudah menyampaikan pandangan bahwa kehadiran satu lembaga baru seperti BRIN belum tentu dapat membenahi tumpang-tindih aktor dalam ekosistem sains dan IPTEK. Namun, berhubung komunitas sains dalam masa lampau, kini, dan depan tidak akan pernah memiliki kuasa, maka BRIN harus terwujud. Terlebih, BRIN sudah menjadi mandat partai.

Di dalam berbagai forum diskusi selama dua tahun terakhir, baik yang terbuka untuk publik maupun tidak, semua aktor telah menyampaikan pandangannya mengenai bentuk ideal BRIN, upaya terbaik untuk menyatukan SDM sains, cara mendorong kualitas ASN dalam bidang IPTEK, dan hingga cara untuk memanfaatkan momentum perubahan yang ada. Di dalam berbagai diskusi tersebut beredar banyak data dan fakta yang menarik, mulai dari kaitan antara teknologi dan pertumbuhan ekonomi hingga minimnya persentase alokasi APBN untuk riset. Namun, fakta yang tidak pernah terdengar adalah soal bagaimana BRIN pada akhirnya hendak diwujudkan. Ketika forum usai, perbincangan umumnya berlanjut ke desas-desus: konon ini dan konon itu mengenai desain apa yang dikehendaki partai untuk lembaga impian bernama BRIN. Yang paling mengherankan, pejabat setingkat menteri pun tidak bisa menjelaskan secara terbuka kepada publik mengapa perpres pengesahan pembentukan BRIN tidak pernah diundangkan oleh KemenkumHAM dalam jangka waktu satu tahun.

Kalimat di atas adalah fakta. Fakta bahwa publik, dan bahkan para pejabat eselon satu dan dua di kementerian yang terkait, tidak pernah mengetahui apa rencana konkrit dalam pembentukan badan riset dan inovasi nasional. Di berbagai forum yang saya ikuti dalam kapasitas profesional, saya mendengar langsung tentang bagaimana para pembuat kebijakan hanya bisa menunggu sampai ada keputusan lanjut dari tingkat yang lebih tinggi, yang tidak terjangkau oleh mereka yang sebenarnya paling terkena dampak keputusan tersebut, yaitu para ASN sains iptek dan komunitas ilmiah itu sendiri. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab masa depan lembaga seperti BPPT, BATAN atau LAPAN. Contoh lain dari keganjilan tata kelola BRIN adalah kaitannya dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di mana dalam draf RUU HIP tersebut dikatakan bahwa pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga akan berperan sebagai pengarah BRIN. Bagi komunitas ilmiah, keterkaitan antara dua lembaga tersebut tidak relevan.

Semenjak kabar peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud mulai beredar, pelaku sains mulai dari peneliti junior, analis kebijakan hingga sosok ilmuwan senior seperti Prof. Mayling Oey-Gardiner urun pemikiran dan pendapat. Dalam observasi saya, hanya satu-dua sosok yang mau menyentuh akar persoalan sesungguhnya, yakni pemikiran sepihak sebuah partai politik terutama para pengurus seniornya yang tidak pernah mengkomunikasikan gagasannya secara transparan dengan para pelaku sains itu sendiri.

Sheila Jasanoff, ilmuwan pengkaji sains, teknologi dan masyarakat, dalam banyak literatur menggunakan istilah civic epistemology untuk menggambarkan ada-tidaknya sebuah nalar publik yang terbentuk dari tabiat negara dalam menggunakan sains untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Di tiap masyarakat harusnya nalar publik itu ada—yang membedakan adalah bentuk dan kualitasnya.

Contoh konkret *civic epistemology* yang terdapat di masyarakat Indonesia adalah persepsi yang terbentuk akibat prioritas negara dalam mendengarkan pendapat pelaku ekonomi ketimbang komunitas ilmiah, terutama pakar kesehatan publik dalam penanganan Covid-19. Rasionalitas yang terbentuk secara timbal balik bukanlah rasionalitas yang didasari oleh nalar kesehatan dan keamanan, melainkan rasionalitas jangka pendek yang didorong naluri ekonomi. Negara melanggengkan hal tersebut di dalam banyak bidang lainnya. Akibatnya, nalar publik di negeri kita dicederai berbagai kepentingan yang senantiasa terselubung dan bahkan dibela oleh negara.

Inilah yang kemudian terjadi lagi dalam kasus pembentukan BRIN. Kebijakan yang harusnya diurus secara profesional, terbuka, rasional, justru menjadi rembuk tertutup elit politik. Kalaupun setelah berbagai kesemrawutan prosedural ini BRIN akhirnya dapat berkiprah dengan baik, para pemangku kepentingan sudah paham bahwa hal tersebut dimungkinkan oleh proses politik yang akhirnya berhasil diurai di balik layar. Forum-forum formal yang menjadi panggung bagi semua aktor untuk menyampaikan opini, gagasan, data dan fakta seolah jadi arena pantas-pantasan saja. Mungkin ada satu-dua pertimbangan yang akan sampai di kuping elit partai, namun apa yang sesungguhnya menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para elit merupakan realitas politik di panggung belakang.

Pada akhirnya, seandainya pun pembentukan BRIN dianggap sebagai sebuah tonggak keberhasilan bagi mereka yang merintisnya. Padahal, yang paling penting sesungguhnya adalah proses bagaimana ia didirikan: minim transparansi, didominasi kekuatan politik, nihil komunikasi terbuka dan tidak dilandasi pertimbangan para pemangku utamanya, yakni komunitas sains dan iptek.

Tak heran jika *civic epistemology* kita miskin cara berpikir ilmiah. *

OPINI

AKP EDIKARAN PRIANTO. SH. MH

Tekan Penyebaran Virus Covid-19, Posko PPKM Perlu Dioptimalkan

Pariaman Kota, Khazanah—Kapolsek Kota Pariaman, Polres Pariaman Kota, Polda Sumbar AKP Edikaran Prianto SH. MH terus berupaya melakukan optimalisasi peran posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) satu di antaranya dengan memberikan bantuan masker dan hand sanitizer kepada warga masyarakat di wilayah hukumnya di Desa Pauh Timur Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Selasa 3 Agustus 2021.

Kata Edikaran, masker itu nantinya akan dibagi kepada warga sekitar melalui masing-masing kelurahan. Penyaluran sengaja di bagikan melalui masing-masing Bhabinkamtibmas yang akan didistribusikan melaui kepada dusun, ucapnya.

Diharapkan dengan adanya upaya optimalisasi posko PPKM ini akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang konsisten dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga upaya pemerintah pusat dan masyarakat dapat dijalankan dengan baik dalam menangani pandemi Covid-19, katanya.

Lanjut Edikaran mengatakan, peranan PPKM di tiap tiap dusun, desa akan dioptimalkan. Saat ini pihaknya

telah melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menerapkan PPKM darurat maupun PPKM mikro," ujarnya

Lanjut Edikaran mengatakan, pihaknya akan membentuk posko pelaporan, disamping itu kepala desa juga dapat menetapkan dan mengubah regulasi dalam bentuk peraturan desa/peraturan kepala desa. Dalam hal ini, jika terjadi eskalasi kasus positif dalam penanganan covid-19. " kepala desa sangat dibutuhkan untuk mengorganisir masyarakat," pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut PPKM darurat di desa, kepala desa wajib menerbitkan surat izin/surat keterangan mobilitas warga yang keluar dan masuk desa.

Lalu, memastikan eksistensi peran posko penanganan covid-19 di desa dan mengoptimalkan anggaran desa untuk pelaksanaan PPKM darurat, ucapnya

"Kepala desa perlu melakukan realokasi kegiatan dan anggaran desa dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19," katanya

Dikatakanya, pihaknya berharap dana desa dioptimalkan dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak," ungkapnya

"Ada sekitar 8% dari dana desa dapat dialokasikan untuk pelaksanaan PPKM mikro dan posko penanganan covid-19 di desa," katanya

Di tegaskanya, Desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai PPKM berbasis mikro dan membentuk posko penanganan covid-19, segera melakukan percepatan penetapan, disamping itu mengintensifkan koordinasi dengan puskesmas, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan satgas covid-19 yang di tingkat Kecamatan," pungkasnya. ■ **firman sikumbang**

MEMBERIKAN BANTUAN – Bhabinkamtibmas Polsek Kota Pariaman saat memberikan bantuan masker dan hand sanitizer kepada warga masyarakat di wilayah hukumnya di Desa Pauh Timur Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Selasa 3 Agustus 2021. (Foto : Firman Sikumbang)

Polsek Baso Gelar Operasi Yustisi Gabungan

Bukittinggi, Khazanah—Polsek IV Angkat Candung, Polres Bukittinggi, Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama TNI dan Satpol-PP kembali melaksanakan operasi yustisi diwilayah hukumnya, dalam rangka Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan percepatan penanganan Covid-19, sekaligus melaksanakan penerapan protokol kesehatan di depan Mako Polsek tersebut, Selasa 3 Agustus 2021.

Kapolsek IV Angkat Candung AKP Purwanta. SH mengatakan, operasi yustisi tersebut difokuskan pada pencegahan peningkatan angka Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan itu mensasar pengendara roda dua, roda empat maupun pejalan kaki, ucapnya

"Kami fokus pada antisipasi pencegahan peningkatan Covid-19 pada pengguna jalan" katanya.

Kata Purwanta operasi yustisi itu juga di ikuti oleh Danramil 8/Biaro Kapten Czi Fakhrullah, Kasi Perda Pol PP Ali Akbar, Kabid kedaruratan dan logistik BPBD Syafrizal. SH, Kasi ops Pol PP Yul Amar, Wakapolsek, Kanit intelkam dan Kanit Sabhara Iptu Ronnal.

Dikatakan Purwanta, operasi ini dilakukan atas perintah Kapolres Bukittinggi AKP Doddy Prawiranegara dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri dan perintah Kapolri terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Serta Pergub Nomor : 37 tahun 2020, tentang tatanan baru produktif dan aman Covid 19 serta Perbup Nomor : 44 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan covid 19," katanya

Lanjut Purwanta mengatakan, operasi yustisi itu selain memfokuskan pada antisipasi peningkatan covid-19 juga mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya.

"Pada saat itu kami mengamankan 23 orang yang tidak mematuhi Prokes seperti tidak menggunakan Masker, kepada mereka diberikan sanksi administrasi sebanyak 10 orang, masing-masing mereka dikenakan denda Rp. 100.000,- dan 13 orang lainya dikenakan sanksi sosial membersihkan fasilitas umum," katanya

Terkait antisipasi gangguan kamtibmas, kata Purwanta, petugas juga melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan pelanggar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peredaran minuman keras dan narkoba, dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan para pelanggar membawa narkoba, atau minuman keras, ungkapnya.

"Pada saat itu petugas juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang sedang melintas di depan makpolsek itu supaya selalu mematuhi protokol kesehatan Covid -19 dengan menerapkan 5M," pungkasnya. ■ **firman sikumbang**

OPERASI YUSTISI - Operasi yustisi gabungan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek IV Angkat Candung. (Foto : Firman Sikumbang)

BERITA KEHILANGAN

Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi B 4738 SFJ atas nama PT. Otsuka Indonesia.
Tercecer/hilang disekitar RS Medina Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon untuk menghubungi kantor polisi terdekat, terima kasih

Personil Polsek Sipora Semprotkan Cairan Desinfektan

SEMPROT – Personel Polsek Sipora semprotkan cairan disinfektan. (Foto : Firman Sikumbang)

Sipora, Khazanah—Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau covid-19 Polsek Sipora, Polres Kepulauan Mentawai, Polda Sumatera Barat (Sumbar) Lakukan sterilisasi lingkungan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan di lingkungan Mapolsek. Pada Senen 2 Agustus 2021.

Kapolsek Sipora Iptu Donny Putra. SH.MH mengatakan pada Khazanah penyemprotan cairan desinfektan itu diutamakan ditempat-tempat yang sering digunakan untuk fasilitas umum. Seperti Penjagaan, ruangan SKCK, Ruangan unit Reskrim, ruangan Mediasi dan ruangan Kapolsek serta gagang pintu, kursi mau pun meja yang ada di setiap ruangan, katanya

Ia berharap, kepada personil dan tamu yang datang ke Makopolsek diharapkan harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk kantor, lalu menjaga jarak antar anggota minimal 1 meter, ungkapnya

"Mudah-mudahan dengan dilakukan penyemprotan disinfektan ini dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19," ungkapnya

Lanjut Donny mengatakan, dimasa Pandemi Covid-19 Polsek Sipora selalu ramai dikunjungi warga, pasalnya kata Donny pihak nya selalu aktif melaksanakan gerai Vaksin Presesi di Mapolsek ini. Bahkan jumlah dari mereka/ pengunjung "bajibun". Untuk mengatasi penyebaran virus Covid -19 itu, bersama personil selalu membersihkan Mapolsek dengan menyemprotkan desinfektan disetiap sudut ruangan, katanya.

Selain itu, kata Donny menjelaskan, juga melakukan pemeriksaan suhu badan setiap personel dan setiap pengunjung yang datang, ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Virus yang mematikan ini, katanya.

"Kita melakukan pencegahan dan mengantisipasi penyebaran. Pasalnya beberapa waktu lalu ada keluarga personil terpapar Virus ini. Kita tidak mau personil personil yang lain ikut terpapar," ungkapnya.

Lanjut Donny mengatakan, "Jika ditemukan personel maupun pengunjung suhu tubuhnya di atas 38 derajat celcius, kita arahkan ke rumah sakit terdekat," tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyediakan wastafel portabel untuk memudahkan warga dan personel mencuci tangan. "Kita juga mengimbau agar seluruh personel tetap waspada dan menjaga kesehatannya," pungkasnya. ■ **firman sikumbang**

Polsek Pasaman Gandeng FIF Group Salurkan Bantuan Kepada Kaum Duafa

Pasaman Barat, Khazanah—Sebahagian kalangan di massa Pandemi saat sekarang ini menjadi momentum untuk saling berbagi antar sesama. Dan pada saat sulit sekarang ini pula segala kebaikan akan diuji oleh Allah SWT.

Janji Allah SWT itu seperti nya dipahami betul oleh Kapolsek Pasaman, Polres Pasaman Barat, Polda Sumbar Iptu Rosminarti. SH. Buktinya pada Selasa pagi, ia mengintruksikan kepada personilnya/Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendataan kepada kaum Duafa yang ada di masing-masing daerah binaanya. Pasalnya pada hari itu ia akan membagikan berupa paket sembako kepada kaum Duafa yang terdampak Virus Corona atau Covid-19.

Kata Rosminarti, bantuan sembako yang akan dibagikan itu berkat kerja sama Polsek Pasaman dengan FIF Group Cabang Simpang Empat Pasaman Barat kantanya.

"Bantuan sebanyak 45 Kg itu yang terdiri dari 10 Kg paket beras dan ditambah paket sembako lainya yang akan kita didistribusikan kepada kaum Duafa yang berada di wilayah hukum Polsek Pasaman melalui masing masing Bhabinkamtibmas," katanya

Dikatakan Rosminarti ini salah satu wujud kepedulian Polsek Pasaman dan FIF Group di tengah pandemi, kita berbagi untuk meringankan beban ekonomi sesama warga, tuturnya.

Rosminarti mengakui bahwa kondisi saat ini sangat memberatkan bagi sebagian warga karena terdampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Untuk itu ia berharap dengan dibagikan paket sembako ini setidaknya bisa sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan, ucapnya.

Lanjut Rosminarti mengatakan, aksi sosial berbagi sembako yang dilakukan bersama FIF Group Cabang Simpang Empat Pasaman Barat ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada warga yang terdampak agar tetap semangat dan optimis mengatasi dampak ekonomi akibat terjadinya wabah Covid-19 ini.

"Alhamdulillah dengan adanya sinergi antara Polsek Pasaman dan FIF Group mudah-mudahan dapat menjadi wasilah/ jalan kebaikan bagi sesama. Kami berharap tidak hanya sebatas program sosial pembagian sembako saja, tetapi dapat terus menjalin sinergi di berbagai program bersama," ucapnya.

"Bantuan yang didistribusikan Bhabinkamtibmas secara langsung dari rumah ke rumah akan jadi lebih tepat sasaran, dan tentunya kita selalu mentaati aturan pemerintah untuk bersama melakukan pencegahan Covid-19 dengan tetap melakukan physical distancing," pungkasnya, ■ **firman sikumbang**

Ditsamapta Polda Sumbar Bagikan Sembako Kepada PKL dan Kaum Duafa

Padang, Khazanah—Rabu 4 Agustus 2021 Direktorat Samapta Polda Sumbar kembali melaksanakan pembagian Bansos berupa sembako kepada para para nelayan, buruh kasar di pelabuhan, dan para pedagang kaki lima disepanjang Pantai Padang yang terdampak penerapan PPKM Covid-19.

Kata Direktur Samapta Polda Sumbar Kombes Pol Acmadi SH. SIk pada Khazanah melalui Komandan Kompi III Iptu Andra Nova. SH. MH mengatakan, Bantuan Sosial berupa Sembako itu di salurkan kepada para pedagang kaki lima yang tengah berjualan di sepanjang Pantai Padang. Begitu juga kepada kaum Duafa yang berada di Kawasan itu, katanya

Dikatakannya kegiatan bantuan sembako kepada pedaggang kaki lima itu dilalukan atas intruksi Dir Samapta Polda Sumbar Kombes Achmadi. Dalam kegiatan tersebut Personil juga membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan imbauan agar masyarakat tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

"Hari itu kita menyambangi para pedaggang satu persatu, kita mengajak para pedaggang agar menerapkan protokol keehatan disaat melaksanakan aktifitas. Seperti menggunakan masker disaat melayani pembeli, katanya

Iptu Andra Nova mengatakan, kepada masyarakat kita juga menghimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari- hari. Karna dengan menerapkan protokol kesehatan, kita bisa memutus penyebaran Virus Corona, ujarnya.

Andra mengakui bahwa memang saat itu masih ditemukan warga yang tidak menggunakan masker. Padahal kata dia menambahkan, pemerintah telah mewajibkan agar selalu mengenakan masker, menjaga jarak sosial (social distancing), jarak fisik (physical distancing dan selalu mencuci tangan dengan sabun, agar terbebas dari penyebaran Covid-19, jelasnya.

Lanjut Andra mengatakan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan adalah satu-satunya jalan untuk memerangi virus Covid-19, katanya.

Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap memproteksi diri. bahwa melindungi diri dari penularan dan penyebaran Covid-19 derajat dilakukan dengan cara menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, enam langkah sesuai anjuran yang telah diberikan pemerintah serta wajib menjaga jarak saat berada di luar rumah, ungkapnya

Andra juga menjelaskan pada Khazanah pada kesempatan itu ia juga mensosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasan Baru (AKB).

Dihadapan warga Anrdra menjelaskan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru itu penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena mengingat sanksi dan denda bagi yang melanggarnya, katanya. ■ **firman sikumbang**

Menuntut Inovasi Kepala OPD di Masa Pandemi

Pariaman, Khazanah - Untuk memaksimalkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Walikota Pariaman, Genius Umar terus menggenjot inovasi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Tidak tanggung-tanggung, Ia menargetkan Kota Pariaman bisa masuk 10 besar Inovasi Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Genius Umar menyebutkan, inovasi tersebut bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.

Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kemedagri, RI. juga memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki inovasi menarik.

Bagi daerah yang memiliki masuk dalam penilaian 10 besar, akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini sangat di butuhkan sekarang karena sejak pandemi ini, kondisi keuangan sangat minim.

Daerah yang masuk ke dalam kategori 10 besar inovasi terbaik akan dapat dana insentif sebesar Rp.9 milyar dan ini bisa menutupi defisit anggaran di daerah dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

Oleh sebab itu, Genius mendorong masing-masing OPD membuat 10 inovasi untuk didaftarkan pada IGA Tahun 2021. Hingga saat ini sudah 108 jumlah judul inovasi OPD. Inovasi tersebut nantinya untuk diperlombakan dalam IGA Tahun 2021.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengembangkan invensi dan inovasi dan wajib pula menggunakannya. .

Oleh karena itu, Genius mentuntut kreatifitas setiap Kepala OPD, terlebih lagi pada masa pandemi dan keterbatasan anggaran saat ini.

Genius Umar menyebutkan, pandemi Covid-19 yang melanda sejak Tahun 2020, telah membuat anggaran yang berasal dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kota Pariaman jauh berkurang.

Oleh karena itu, perlu kreatifitas dari Kepala OPD untuk menyiasati hal ini.

Menurutnya, pemerintahan dan pembangunan harus terus berjalan ditengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir ini.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan inovatif dalam hal menjalankan kegiatan yang ada di OPD nya masing-masing, dengan memaksimalkan kemampuan yang ada.

Dirinya tidak mau mendengar, jika Kepala OPD mengatakan tidak ada anggaran, sebagai pimpinan di dinasnya, kadis harus kreatif mencari jalan keluarnya, dan dapat menyiasati hal ini, salah satunya bisa mencari dana dari APBN atau pihak swasta.

"Beberapa proyek pembangunan seperti program waterfront city banyak dibantu oleh pemerintah pusat, pembangunan Pasar Rakyat Kota Pariaman, dan beberapa DAK lain," kata Genius ■ **Syafrial Suger.**

TERKAIT PANDEMI COVID-19

Genius Revisi RPJMD Kota Pariaman

Pariaman, Khazanah— Di pertengahan masa pemerintahannya, Wali Kota Paiaman, Genius Umar merevisi rencana awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 -2023. Revisi dilakukan menyangkut target yang ditetapkan dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi daerah setelah masa pandemi Covid-19.

REVISI- Di pertengahan masa pemerintahannya, Wali Kota Paiaman, Genius Umar merevisi rencana awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 -2023. Revisi dilakukan menyangkut target yang ditetapkan dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi daerah setelah masa pandemi Covid-19 **(foto: Ist/net).**

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman dilakukan melalui konsultasi publik dan melibatkan DPRD Kota Pariaman, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat dan kepala desa/lurah se Kota Pariaman, di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (4/8).

Dalam sambutannya Wali Kota Genius Umar mengatakan bahwa pada penyesuaian tema pembangunan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023, tema yang telah dibuat pada Tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan.

Tahun 2021 yang awalnya pemantapan daya saing daerah melalui sektor strategis menuju Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya dilakukan perubahan menjadi peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan daerah.

Tahun 2022 awalnya pemantapan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya dirubah menjadi percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah dan penguatan system kesehatan daerah.

Sedangkan tahun 2023 yang awalnya perwujudan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya berubah menjadi pemantapan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya.

"Perubahan ini kita lakukan sesuai tema pembangunan Kota Pariaman, namun mewabahnya pandemi Covid-19 di Kota Pariaman memerlukan upaya percepatan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah," ujar Genius.

Ia menyebutkan, program unggulan Pemerintah Kota Pariaman dibawah kepemimpinan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin yang sedang berjalan antara lain, melanjutkan program kesehatan gratis, prgram penddikan gratis, kartu pariaman pintar.

Selanjutnya, program bus sekolah gratis ,magrib mangaji dan subuh mubarakah, program satu keluarga satu sarjana,pembangunan mesjid terapung pariaman, pembangunan GOR dan *Youth Center*, pembangunan pusat pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (tingkat SLTP), MDU (tingkat SMU).

kemudian program Pariaman sejahtera, pembangunan Pusat Pendidikan Al-quran, pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM, pengembangan jalan sisi timur Pariaman.

Selain itu, program pemberian kesejahteraan guru honor PAUD, TK, SD dan SMP, pengembangan water front city, kesempatan kerja keluarga miskin, serta revitalisasi PKK dan revitalisasi pasar yang ada di Kota Pariaman.

Untuk program kesehatan gratis di Kota Pariaman sudah terlaksana sampai 99,2 % artinya masyarakat Kota Pariaman bisa berobat gratis di Rumah sakit Umum Kota Pariaman.

Kartu Pariaman pintar ditujukan bagi warga Kota Pariaman yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan anggarannya dari APBD Kota Pariaman.

Sementara program magrib mangaji dan subuh mubarakah saat ini masih belum optimal karena pandemi Covid-19.

"Namun kita meminta kepada punyuluh agama desa untuk lebih aktif dalam membina masyarakat setempat agar program tersebut bisa berjalan namun dengan metode yang berbeda," kata Genius.

Ia berharap kepada semua OPD untuk dapat melakukan dengan segera program - program yang masih berjalan namun belum mencapai target, sehingga tepat nanti pada Tahun 2023, semua program unggulan terlaksana dengan sukses dan masyarakat Kota Pariaman akan merasakan dampak positif program unggulan tersebut.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Pariaman, Fadli menungkapkan bahwa revisi ranwal RPJMD 2018 - 2023 Kota Pariaman ini dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017PP 13/2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Pasal 342 ayat (1) huruf (c) pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah terjadi perubahan yang mendasar, Pasal 342 ayat (3) Perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan kegiatan ini terlaksana dengan semestinya," tutupnya ■ **Syafrial Suger.**

Pedestrian Area Ditambah, Payakumbuh Dipercantik

Payakumbuh, Khazanah— Wali Kota Riza Falepi terus mempercantik wajah Kota Payakumbuh, setelah sukses membangun pedestrian area mulai dari simpang Tugu Adipura hingga depan Bank Nagari pada tahun 2020 lalu, kali ini dilanjutkan pembangunan pedestrian area sepanjang 190 meter mulai dari depan Ramayana hingga Simpang Benteng.

Tampak pekerja dari CV. Eksa Auli Prima sedang asik bekerja mengaduk semen di mesin molen, Rabu (4/8).

Kadis PUPR Kota Payakumbuh Muslim melalui Kabid Bina Marga Erwin saat ditemui media di kantornya mengatakan Pemko menganggarkan 2,1 Miliar anggaran untuk membangun pedestrian area tersebut. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan selama 6 bulan pekerjaan.

Saat ini tampak, lantai kerja sedang dibeton oleh pekerja untuk dudukan U-ditch yang merupakan saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U dan juga bisa diberi tutup, karena apabila mengandalkan tanah sebagai penopang maka pemadatan tidak sempurna, sebagai antisipasi agar pedestrian area nanti malah turun.

"Dengan memakai U-Ditch, tingkat kebocoran kurang, dan aliran air di drainase pusat kota tidak terganggu," ungkapnya.

Erwin juga menginformasikan banyak ditemukan sampah plastik pada saluran drainase, beruntung ukuran salurannya besar, kalau tidak pasti tersumbat dan memicu banjir atau genangan air.

"Kami menghimbau masyarakat jangan membuang sampah ke

saluran drainase, sungai maupun irigasi karena dampaknya apabila sampah menyumbat saluran, maka air akan tergenang saat hujan lebat turun, yang akan rugi tentu masyarakat itu sendiri," kata Erwin.

Untuk tahun 2022 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan membangun pedestrian area di seberang jalan pembangunan pedestrian area Jalan Sudirman saat ini, panjangnya kurang lebih sama, sehingga wajah kota akan semakin cantik.

"Kita mohon dukungan masyarakat yang terdampak rencana pembangunan ini nanti bersedia tanahnya diganti wajar oleh pemerintah kota sesuai kajian dari KJPP. Sehingga wajah Kota Payakumbuh yang cantik nanti tentu bisa dinikmati oleh setiap yang berkunjung maupun warga Payakumbuh sendiri," uajrnya ■ **Lili Yuniati.**

Langkan

Epyardi Tuan Rumah

Arosuka, Khazanah— Bupati Solok H. Epyardi Asda, M.Mar menjadi tuan rumah kegiatan Forum Silaturahmi dan Persaudaraan Bupati dan Wali Kota Se - Sumatera Barat, yang dilaksanakan di Chinangkiek Dream Park Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Selasa (3/8).

Acara itu dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya) dan Wakil Sekjen Apkasi Nasional Beny Dwifa Yuswir (Bupati Sijunjung)

Juga hadir Koordinator wilayah Apkasi Sumatera Barat Eka Putra, SE (Bupati Tanah Datar), Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Sumatera Barat (Mewakili) serta Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.

Bupati Epyardi Asda pada acara itu mengucapkan selamat datang di Kabupaten Solok dan berharap dengan acara ini dapat menambah persaudaraan sesama Kepala Daerah di Sumbar.

Tujuan kegiatan ini kata Epyardi, sebenarnya supaya bisa saling bertukar pikiran dan saling bertukar informasi, serta saling berkoordinasi antar Kepala Daerah.

"Melalui Ketua Umum Apkasi yaitu Bapak Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai perpanjangan tangan kita ke pemerintah pusat, beliau bisa menjadi penggerak untuk bertemu dengan Kementrian yang ada di Jakarta, termasuk berbicara langsung dengan Bapak Presiden," ujar Epyardi.

Sementara itu, perwakilan Wali Kota se- Sumbar yang disampaikan oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar pada kegiatan itu mengatakan, sangat mengapresiasi dan mendukung acara forum silaturahmi dan persaudaraan kepala daerah tersebut ■ **Riswan Jaya.**

Wakapolri Tinjau Vaksinasi

Padang, Khazanah— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendampingi Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meninjau vaksinasi massal bagi lansia di gedung HBT Klenteng, Kota Padang, Rabu (4/8).

Ikut hadir dalam peninjauan vaksinasi massal tersebut, Toako HBT, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, jajaran pejabat utama Polda Sumbar dan unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan itu Wakapolri memuji antusiasme masyarakat Sumbar termasuk masyarakat lanjut usia (lansia) untuk mendapatkan vaksin dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Mahyeldi mengatakan, antusiasme warga Sumbar untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 saat ini sangat tinggi. Permintaan vaksin tidak hanya dari Kota Padang tetapi juga dari berbagai kabupaten dan kota di daerah itu.

"Kita sempat kehabisan vaksin untuk didistribusikan karena itu kita minta dukungan dari pusat. Sekarang sudah dikirimkan 30.900 dosis vaksin namun jumlah itu masih belum mencukupi," katanya.

Mahyeldi juga menyampaikan, bahwa ia sudah meminta hingga 800 ribu vaksin ke pusat dan berharap secara bertahap bisa dipenuhi karena saat ini secara nasional vaksin yang tersedia memang terbatas.

"Target kita itu 4,5 juta warga Sumbar bisa tervaksinasi. Mudah-mudahan dengan bantuan distribusi vaksin dari pusat, bisa secepatnya tercapai," harapnya ■ **Inoval Agesly.**

Kaba Nagari

NAGARI SAKO SELATAN

Wali Jorong Harus Pandai Membaca Alquran

JORONG- Tim Seleksi Penjaringan Bakal Calon Wali Jorong di Nagari Sako Selatan Pasia Talang memasukan pandai membaca Al-Quran sebagai syaratnya selain seleksi interviu tentang pengetahuan pemerintahan dan pengetahuan umum **(foto: Ist/net).**

Padang Aro, Khazanah— Keberadaan Wali Jorong menjadi sangat penting dalam rangka mendukung berbagai tugas Wali Nagari dalam mewujudkan berbagai kegiatan pembangunan masyarakat nagari.

Bahkan salah satu syarat yang menjadi materi dalam seleksi bagi calon para Wali Jorong tersebut, oleh Tim Seleksi Penjaringan Bakal Calon Wali Jorong di Nagari Sako Selatan Pasia Talang memasukan pandai membaca Al-Quran sebagai syaratnya selain seleksi interviu tentang pengetahuan pemerintahan dan pengetahuan umum.

" Kita melibatkan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sako Selatan Pasia Talang untuk ikut menyeleksi para calon wali jorong, melalui seleksi pandai baca Al-Quran, " kata Penyelenggara Seleksi Wali Jorong di Nagari Sako Selatan Pasia Talang Oktaviendry, SE, Selasa (3/8/2021).

Baru-baru ini ada dua Wali Jorong yang telah habis masa tugasnya, yaitu Wali Jorong Sungai Talu dan Wali Jorong Lolo Kaciak.

Maka untuk mengganti wali jorong yang habis masa tugas tersebut. Panitia seleksi di bahwah koordinator Seksi Pemerintahan Nagari telah menyepakati dan menetapkan seleksi calon selain interviu juga harus pandai baca Al-Quran serta syarat administrasi, " kata Oktaviendry yang juga Kasi Pemerintahan Nagari setempat.

" Pandai baca Al-Quran, menjadi salah satu syarat seleksi yang meski dilalui para calon Wali Jorong di Nagari ini adalah inovasi Pemerintahan Nagari Sako Selatan, " tambahnya.

Khusus untuk seleksi pandai Al-Quran ini, tim telah memberi amanah pada Bamus Nagari untuk menyeleksinya. Sehingga Wali Nagari saat menetapkan wali jorong, akan mengacu pada rekomendasi dari hasil seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, pandai baca Al-Quran dan seleksi interviu, " jelas Oktaviendry.

Hasil dari rangkaian seleksi calon wali jorong dari dua jorong di Nagari, telah ditetapkan, Syafri Joni sebagai Wali Jorong Lolo Kaciak, dan Rafi Loza sebagai Wali Jorong Sungai Talu, " papernya.

Ditempat terpisah, Wali Nagari Sako Selatan Pepi Suhendra membenarkan, bahwa salah satu materi seleksi calon wali jorong di nagarinya adalah wajib pandai baca Al-Quran.

Hal tersebut adalah bagian dari visi dan misi Pemerintahan Nagari dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten bidang mencerdaskan anak nagari dan pembangunan bidang keagamaan masyarakat nagari.

Apalagi pemimpin saat ini, sudah menetapkan program unggulan beliu, satu jorong, ada satu rumah tahfizd Quran

" Jika Wali Jorong sudah pandai baca Al-Quran, maka segala bentuk program Pemerintah yang berkaitan dengan ketaatan dan penerapan dalam beribadah serta berprilaku sesuai dengan khaidah hidup bermasyarakat yang islami akan lebih mudah dilaksanakan, " harap Pepi.

Sisi penting dari Wali Jorong yang pandai baca Al-Quran, tentu akan terbangun kehidupan masyarakat disetiap jorong yang ada di nagari ini lebih baik, terutama dalam membangun kehidupan masyarakat yang berbudi pekerti, serta damai dalam berbagai aktifitas masyarakat nagari," pungkas Pepi Suhendra.

Potong Komisi, Pengemudi Ojol Bakal Demo dan Mogok Kerja

Para pengemudi ojek online akan menggelar demo dan mogok kerja terkait pengurangan potongan komisi ditengah menurunnya pendapatan selama pandemi Covid-19

Jakarta, Khazanah – Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam asosiasi ojek online atau Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) akan menggelar demo bila permintaan terkait pengurangan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen oleh aplikator tidak terealisasi.

Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut akan dilakukan bila pihak aplikator masih tidak mengindahkan permintaan para pengemudi. Dia bahkan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi mediator antara pihak pengemudi dengan aplikator.

"Tapi kalau pemerintah saja sudah tidak didengar oleh perusahaan aplikator mungkin seluruh pengendara ojol seluruh Indonesia akan turun melakukan aksi nyata. Bisa turun ke jalan, bisa mogok kerja," katanya di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Kendati begitu, Igun tidak menjelaskan kapan pastinya aksi nyata tersebut akan dilakukan. Dia masih memberikan kesempatan bagi aplikator maupun pemerintah untuk bernegosiasi. Lebih lanjut dalam poster yang dibagikan oleh para pengemudi ojol tampak 34 logo Garda daerah mulai dari Aceh hingga Papua Barat yang menyatakan akan ikut aksi nyata tersebut.

"Turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen atau kami turun serentak seluruh Indonesia," demikian tertulis di poster tersebut. ■ **JJ/Ant**

PEMKAB PADANG PARIAMAN SASAR INVESTASI

Pariwisata Jadi Sektor yang Diunggulkan

Pariaman, Khazanah – Sektor pariwisata menjadi sasaran investasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dengan harapan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal di daerah pada masa pandemi Covid-19.

"Investasi di Padang Pariaman saat ini memang mengalami penurunan tetapi kami optimis untuk mencapai target. Salah satu proses percepatan investasi di Padang Pariaman yaitu pengembangan Kawasan Anai Land di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenal di Parit Malintang, Rabu (4/8/2021)

Rudy mengatakan investasi tersebut dilakukan di tanah hak guna usaha dengan luas 400 hektare yang diperkirakan nilai investasinya hampir Rp500 miliar.

Menurutnya kawasan tersebut dikembangkan wahana rekreasi berbasis air, hotel bintang 5, kebun binatang mini, senior citizen, gedung untuk teropong bintang, dan objek wisata lainnya yang terintegrasi.

"Kami sudah memberikan rekomendasi tata ruang, karena ini kawasan sangat besar maka perizinannya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal," katanya.

Pemkab Padang Pariaman, lanjutnya juga mencoba mengkerjasamakan lahan milik pemerintah daerah itu di daerah Malibo Anai, di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam kepada pihak Anai Land. Selain dari sektor wisata, kata dia pihaknya juga berupaya mendorong percepatan investasi pembangunan produksi pakan ternak di kawasan Padang Industrial Park.

Anai Land salah satu objek wisata yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di daerah Padang Pariaman

"Dua ini adalah investasi skala besar di Padang Pariaman di samping perumahan semenjak perubahan tata ruang namun karena pandemi tingkat daya beli masyarakat kurang," ujarnya.

Akibat rendahnya daya beli masyarakat terhadap perumahan, lanjutnya maka pengembang pun juga menahan diri untuk menginvestasikan uangnya. Pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan investasi di Padang Pariaman salah satunya dengan mengunjungi perusahaan terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daring bahkan melaksanakan bimbingan teknis sebanyak empat kali.

Selain itu, pihaknya juga melakukan investasi jemput bola guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia berharap pembangunan tol di Padang Pariaman juga terus berlanjut karena juga meningkatkan investasi di daerah itu. ■ **JJ/Ant**

Pelanggan Premium PLN UP3 Padang Terus Meningkat

Padang, Khazanah – Selama pandemi Covid-19, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang mendapatkan penambahan pengajuan pelanggan layanan premium.

Penyambungan Pelanggan Premium dilakukan dengan total tujuh pelanggan pada Juli 2021 lalu. Rata-rata pengajuan tersebut berasal dari pelanggan bisnis, industri dan rumah tangga yang sebelumnya telah menjadi pelanggan reguler.

Tujuh pelanggan tersebut adalah Hasmawita, Fitriati, Geri Ibrahim dan Zahardi yang merupakan Pelanggan Premium tarif Industri. Z. Suhaimi dan PT. Cahaya Sumber Raya yang merupakan pelanggan premium tarif bisnis. Kemudian Majolelo Town House satu-satunya Pelanggan Premium tarif Rumah Tangga UP3 Padang di bulan ini. Dengan bergabungnya tujuh pelanggan ini, UP3 Padang mendapatkan total daya tersambung sebesar 1.359.000 VA dari Pelanggan Premium.

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, Jeffri Husni, menjelaskan, mayoritas pengguna listrik PLN di Padang merupakan pelanggan reguler. Namun untuk menjamin keandalan suplai listrik dalam kegiatan operasionalnya banyak pelanggan yang telah beralih menggunakan layanan premium.

"Layanan Pelanggan Premium merupakan layanan prioritas dari PLN, dimana stabilitas suplai listrik bisa diandalkan di bandingkan pelanggan reguler dan mendapatkan fasilitas contact center account marketing 24 jam," ujar Jeffri.

7 Pelanggan Premium yang baru bergabung ini menambah deretan keseluruhan Pelanggan Premium di PLN UIW Sumatera Barat yang berjumlah 691 pelanggan sampai dengan Juli 2021. Dalam situasi pandemi Covid-19, banyak pelanggan PLN yang membutuhkan pelayanan khusus. Terlebih industri dan bisnis dalam mendukung kegiatan operasionalnya.

"Sehingga kami bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan maupun calon pelanggan dimanapun berada untuk mendukung pertumbuhan sektor bisnis dan industri yang memang membutuhkan keandalan pasokan listrik yang tinggi," ungkap Jeffri.

Layanan prioritas yang disiapkan mulai Premium silver, premium bronze, premium gold dan juga premium platinum. Karena dengan semakin banyaknya pelanggan premium, bisa turut membantu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan sektor perekonomian. Selain itu, bisa ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber pajak penerangan jalan.

Tak hanya Layanan Premium yang memberikan keandalan suplai listrik, saat ini PLN sedang ada Program Super Merdeka Listrik yang memberikan harga penyambungan spesial Biaya Penyambungan (BP) tambah daya bagi konsumen tegangan rendah daya 450 VA dan 900 VA semua golongan tarif, yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir hingga daya 5.500 VA. Dengan harga yang ditawarkan hemat hingga jutaan Rupiah, yaitu hanya seharga Rp. 202.100. Untuk mengikuti Program Super Merdeka Listrik, pelanggan tinggal mengakses melalui aplikasi New PLN Mobile yang memberikan kemudahan layanan dalam satu genggaman. ■ **JJ/Ant**

Sukses Dipasar Global, Tiga Pebisnis Indonesia Jadi Primadona

Jakarta, Khazanah – Tiga pebisnis muda Tanah Air mampu mengharumkan nama besar Indonesia di pasar internasional. Lewat pengolahan hasil pertanian, ketiganya mampu menaklukan dan berbisnis di kancah global, siap memberikan inspirasi bagi pelaku usaha dalam negeri lainnya yang ingin melebarkan sayapnya di luar negeri.

Ketiga pebisnis tersebut adalah Trisila Juwantara selaku Founder Yuasafood, pioneer budidaya tanaman Carica, pengolahan carica, wisata alam, wisata edukasi serta kewirausahaan yang sukses membuka banyak peluang pekerjaan dan mencetak ratusan wirausaha baru di Wonosobo.

Trisila memiliki visi menciptakan produk makanan berbahan baku lokal dengan standar kualitas dan pemasaran global. Pihaknya, telah melakukan eskpor ke Thailand, Malaysia, Singapura pada tahun 2016 hingga 2019 masing-masing sebanyak 1 container yang terdiri dari 8 ton bahan jadi dalam bentuk *frozen* dan kemasan.

Tak mau sukses sendiri, Trisila membentuk kluster usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mengolah carica dan menggandeng Dinas Koperasi setempat serta kelompok pemuda desa di Dieng. UMKM inilah yang kemudian menyerap pasokan carica yang berlebih dari petani.

"Multiplier effect ini kami coba lakukan sehingga buah carica bisa menjadi icon, tidak hanya bagi Wonosobo tetapi Jawa Tengah dan Nasional," tuturnya di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Begitu juga dengan Kadek Surya Prasetya Wiguna selaku pemilik Cau Chocolates Bali juga sukses berbisnis di pasar global. Kadek, memiliki cita-cita mulia untuk melihat petani Bali yang selama ini relatif masuk golongan masyarakat miskin, menjadi memiliki harapan yang lebih baik untuk penghidupan mereka melalui pertanian kakao fermentasi organik. Kini, Cau Chocolates bekerjasama dengan ratusan petani kakao di seluruh Bali, untuk menghasilkan biji kakao organik berkualitas tinggi melalui proses fermentasi.

Di Kabupaten Tabanan lebih dari 15 kelompok tani dengan anggota tidak kurang dari 20 orang petani kakao setiap kelompok, sebagai mitra Cau Chocolates dalam menghasilkan biji kakao organik terfermentasi. Sementara di Kabupaten Jembrana, Cau Chocolates juga bekerjasama dengan sebuah koperasi tani yang bernama Koperasi KSS yang beranggotakan lebih dari 600 orang petani. Mulai beroperasi pertengahan 2016, PT Cau Chocolates International mulai mengekspor produk chocolate ke New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, dan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan ekspor ke Amerika.

Hal serupa dilakukan oleh Wildan Mustofa dan sang istri, dalam membantu petani kopi di Pangalengan, Bandung lewat usahanya yang bernama Java Frinsia. Melalui perusahannya, CV Frinsa Agrolestari, Wildan memberikan deposit untuk petani dan kemudian nantinya petani akan

menanam kopi sesuai pesanan. Frinsa sengaja memberikan fasilitas bibit dengan harga murah agar warga tertarik menjadi kopi.

Kendati demikian, petani yang mendapat bantuan juga tidak diwajibkan menjual hasil panen kopi mereka ke Java Frinsa, alias mereka bebas menjual kemana pun. Salah satu kunci sukses keberhasilannya adalah jejaring yang luas atau networking. Dirinya selalu membuka diri untuk terhubung dengan sesama pengusaha kopi, pemerintah, perbankan hingga petani kopi. Ia menegaskan bahwa mengembangkan diri adalah keharusan.

"Barangsiapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi dan barangsiapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung," ungkap Wildan dengan semangat.

Saat ini, Green Bean Kopi Java Frinsa telah diekspor ke 4 negara, di antaranya Australia, Norwegia Amerika Serikat dan China dengan menerima pembayaran *Telegraphic Transfer* (TT) karena rata-rata pembeli mereka adalah *buyer* lama.

Selain terkenal di kancah internasional, Java Frinsa juga memenuhi permintaan pasar lokal yang mana pemasarannya mengandalkan Instagram dan Tokopedia. ■ **JJ/Ant**

September 2021, Bantuan Uang Kuliah Rp 745 Miliar Disalurkan

Jakarata, Kahzanah – Pada September mendatang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan total anggaran Rp 745 miliar.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan, bantuan Uang Kuliah Tunggal ini diberikan dengan batas maksimal Rp 2,4 juta per mahasiswa. Jika besaran Uang Kuliah Tunggal ini lebih besar dari Rp 2,4 juta, maka selisih UKT tersebut menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa.

"Jadi bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau Beasiswa Bidikmisi," kata Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Adapun mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT, mekanisme pendaftaran penerima bantuannya cukup mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi. Setelah itu pimpinan perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan ke ke Kemendikbudristek.

"Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing," tandasnya. ■ **JJ/Bis.com**

KEHILANGAN

BERITA KEHILANGAN

Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma dengan nomor polisi BA 4 6251 O atas nama Kuning Setiawan.
Tercecer/hilang disekitar kawasan Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon untuk menghubungi kantor polisi terdekat, terima kasih

KEHILANGAN

BERITA KEHILANGAN

Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK mobil antik dengan nomor polisi BA 3224 L atas nama H.Suarlis St Kamaruddin.
Tercecer/hilang disekitar kawasan Bukittinggi
Bagi yang menemukan mohon untuk menghubungi kantor polisi terdekat, terima kasih

Istana Dituding

DARI HALAMAN 1

Andi menilai pengecatan Ini bermakna menghapus jejak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pesawat Kepresidenan. Pesawat tersebut semula berwarna biru yang identik dengan partai Demokrat. Pesawat itu rencananya dijadikan berwarna merah putih.

"Menghapus jejakmu kata Ariel (Peterpan)," kata Andi di akun Twitter resminya, Rabu (4/8).

Andi mengingatkan di masa pemerintahan SBY terjadi pembelian pesawat kepresidenan. Namun pemerintahan Presiden Joko Widodo kini memilih mengubah warna cat pesawat kepresidenan.

"Tahun 2014, setelah 69 tahun menyewa, akhirnya Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Tahun 2021, setelah 7 tahun memiliki pesawat kepresiden, akhirnya Presiden mengecat pesawat itu dengan warna lain. Sangat sederhana," ujar Andi.

Selain itu, Andi merasa heran dengan pemilihan warna yang akan melekat pada pesawat kepresidenan. Ia mengklaim warna biru pada pesawat kepresidenan sebagai bentuk kamuflase di atas langit. Patut dicatat, saat ini sudah dikenal teknologi radar guna mendeteksi pesawat.

"Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera bisa juga corona. Dulu biru. Desain dan warna karya seorang mayor desainer di TNI AU. Dominasi biru langit adalah upaya peningkatan keamanan penerbangan, sebagai warna kamuflase saat terbang," jelasnya.

Terlepas dari warna cat, Andi menekankan bahwa keselamatan Presiden di dalam pesawat kepresidenan harus menjadi fokus utama. "Keselamatan Presiden jadi pertimbangan utama. Terutama Presiden setelah SBY, karena SBY hanya menggunakannya beberapa bulan saja," katanya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan ini. Pesawat kepresidenan dicat ulang dalam rangka HUT ke-75 RI.

"Benar, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 telah dilakukan pengecatan ulang. Pengecatan Pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan Pesawat RJ," kata Heru dalam keterangan tertulis.

Ia mengklaim pesawat memang sudah harus masuk perawatan besar atau overhaul, dengan kategori C Check. Di dalam dunia penerbangan, perawatan C Check lebih berat daripada A Check atau B Check.

"Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan. Mengenai cat, memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, merah dan putih. Warna bendera nasional," kata Heru, Selasa (3/8).

Sebelumnya, pengecatan pesawat kepresidenan jadi sorotan publik usai cuitan pengamat penerbangan Alvin Lie. Alvin menyebut biaya pengecatan pesawat berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah menggelontorkan anggaran sebegitu besar di saat krisis. Alvin menyebut pengecatan itu sebagai bentuk foya-foya.

Dari unggahannya, Alvin menuliskan biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar US$ 100 ribu hingga US$ 150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.

"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M @KemensetnegRI @setkabgoid @jokowi," tulis Alvin lewat akun @alvienlie21, Selasa (3/8).

Menurut Alvin, pengecatan pesawat memiliki dua metode. Pertama metode sanding, yaitu penghiapusan warna cat dengan cara diamplas hingga hilang warnanya dan kemudian dicat dengan warna dan pola baru.

Kedua, metode stripping, yaitu dengan cara cat lama dikupas total hingga ke kulit pesawat (bare metal), kemudian dicat ulang.

Dengan nominal yang tak sedikit itu, Alvin pun mengkritik langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, langkah tersebut tak menunjukan sense of crisis terhadap situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang diakibatkannya.

Alvin berpendapat, sepatutnya pemerintah menanggunhkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Bagi Alvin, pengecatan ulang dan merubah warna pesawat kepresidenan bukanlah kebutuhan yang mendesak ■ **/**Novrizal Sadewa.**

Optimistis

DARI HALAMAN 1

rusak.

Sedangkan yang memiliki sifat tetap dan abadi hanya Dzat Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS: Al-Qasshash: 8: Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Dzat Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS Al-Qasshash: 8)

Alam raya ini, termasuk bumi dan penduduknya tidak pernah dalam kondisi yang utuh dan aman dari kerusakan (bencana) sepanjang masa. Kebaikan dan kerusakan (nikmat hidup dan musibah/kematian) ada dalam keseiringan dan melingkupi kehidupan manusia.

Keduanya datang silih berganti dengan tujuan menguji tingkat kualitas amal baik mamnusia.

Bagi manusia, musibah atau kesulitan dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan. Namun hal itu pasti akan melintasi perjalanan hidup manusia untuk menguji kesabaran agar mereka kembali mengingat Allah SWT.

Allah berfirman: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS: Al-Mulk: 2).

Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mati dan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan bagi umat manusia.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir dari negeri Suriah menyebutkan bahwa Allah menciptakan maut dan kehidupan semata untuk menguji umat manusia, yaitu siapa di antara kalian yang baik dalam beramal, dan juga sebagai balasan atas amalan mana yang pantas diberikan pahala.

Sebaik-baik amalan adalah yang ikhlas mencari ridha Allah dan mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Titik tekan dari amalan kita adalah pada tingkat keikhlasan. Ayat tersebut mengindikasikan bahan pada "yang paling banyak amalnya", tetapi sejauh mana amalan itu dilaksanakan dengan tingkat kerelaan yang tinggi.

Di dalam ayat tersebut juga menyebutkan ampunan (al-ghafur) setelah kemuliaan (al-aziz) yang memiliki makna bahwa kemuliaan akan diperoleh setelah mendapatkan pengampunan dosa dan amal shalih.

Sebagai orang yang beriman, kita mestinya mampu menangkap isyarat yang diberikan Allah kepada kita, apapun bentuknya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menyebut objek bicara (mukhathab) ditujukan kepada orang-orang beriman.

Kenapa? Karena orang-orang beriman lah kelompok yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan-pesan ketuhanan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk pesan-pesan musibah Covid-19 yang sedang kita alami saat ini.

Oleh karena itu, seberat apapun ujian yang kita rasakan, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan Allah. Allah adalah Dzat Yang Maha segalannya dan Allah bisa melakukan apapun jika Dia berkehendak.

Tentu, selain kita harus bersabar dan tetap berusaha sebaik mungkin agar terhindar dari musibah, kita harus tetap menyediakan ruang batin untuk terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan selama ini.

Jika kita hitung, musibah yang sedang melanda dunia tidak sebanding dengan jumlah nikmat yang pernah diberikan Allah sepanjang kehidupan di dunia ini.

Terkait hal tersebut, syukur adalah cara terbaik agar kita tetap survive dengan sikap yang positif di tengah musibah pandemi. Syukur merupakan cara cerdas orang beriman dalam menghadapi musibah.

Syukur adalah wujud penghambaan nyata kepada Allah bahwa manusia sangat bergantung kepada-Nya. Syukur juga sekaligus menunjukkan bahwa musibah tidak menjadikan semua proses kehidupan ini berhenti total, apalagi dengan sikap putus asa dengan menuntut keadilan Tuhan.

Satu hal lagi yang juga patut kita syukuri di tengah situasi sulit seperti ini kita merasakan adanya iklim solidaritas yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

Banyak kalangan berpunya yang memiliki kepedulian sosial (filantropi) untuk ikut serta memilkul beban dalam menghadapi bencana ini melalui penyaluran bantuan-bantuan sosial. Patut kiranya hal ini terus kita tumbuhkan agar situasi semakin membaik dengan terus saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran.

Dalam konteks kehidupan umat beragama, kita juga merasakan terjaganya kerukunan, kebersamaan, dan saling pengertian di tengah keragaman, meski dinamika kecil tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena praktik moderasi beragama (wasathiyah) yang telah terjaga di tengah umat beragama.

Sikap moderat dalam beragama benar-benar menjadi pondasi yang kokoh selain faktor ekonomi dan politik di tengah wabah penyakit yang melanda bangsa ini.

Jika kita semua mampu menempatkan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama moderat dan tidak terseret dalam tarikan paham dan perilaku ekstrem kanan dan ekstrem kiri, niscaya kita akan tetap mampu bertahan sebagai bangsa yang besar dan maju.

Sejarah telah membuktikan bahwa umat beragama di Indonbesia telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa praktik "moderasi beragama" merupakan modal penting bagi berdiri dan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI yang terbangun hingga kini.

Pilar-pilar kebersamaan dan keharmonian dirajut melalui paham, sikap, dan perilaku beragama "jalan tengah" sehingga mempertebal ikatan persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan.

Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut terletak pada posisi di tengah, sehingga menjadi pangkal untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan teduh.

Moderasi beragama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan, di mana bergama atau berprilaku agama sesuai dengan porsi yang telah ada.

Tidak ada intrik untuk melebihkan atau mengurangi sebuah ajaran sebagaimana dilakukan oleh sekelompok kecil umat beragama.

Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tentu tahu bahwa radikalisme agama, atau konflik kekerasan yang banyak terjadi itu karena adanya prilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai pondasi utama bermasyarakat.

Agama wajib dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan konflik di tengah kehidupan umat.

Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan bahwa agama mengusung misi yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun.

Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap masalah yang muncul bisa menemukan penyelesaian dengan baik. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan kedamaian agar problem-problem hidup tidak terus muncul.

Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama dan umat Islam secara keseluruhan harus dapat menempatkan seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional dan akhirnya kita mampu melalui situasi ini dengan baik, rukun, dan damai.

Gubernur:

DARI HALAMAN 1

Pemprov, maka yang meminta harus belajar dulu terkait aturan yang mengikat tentang bantuan tersebut karena ada mekanismenya. Kecuali uang pribadi yang diberikan. Mohon DPRD juga dapat sama-sama memahaminya," sambung Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan bahwa, walaupun mungkin terlihat belum optimal, Pemprov akan selalu berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Sumbar. Menurutnya, tidak ada satupun niat Pemda, termasuk kabupaten/kota yang tidak serius dengan ini.

"Kita sudah melakukan banyak hal tapi memang tidak semuanya diberitakan karena yang penting kita bekerja. Misal terkait oksigen, kita sudah rapat Sabtu lalu dengan OPD dan rumah sakit. Terima kasih atas masukan DPRD," jelas dia.

Terkait bantuan untuk laboratorium yang viral itu, Gubernur Mahyeldi mengaku sudah bertemu dengan Rektor Unand, Yuliandri, dan dijelaskan mekanisme dan segala sesuatunya agar bisa dipahami.

"Pemprov, saya sebagai gubernur bukan malaikat, juga manusia biasa pasti ada kekurangan-kekurangan. Kami tidak akan komentari berita-berita viral karena pekerjaan kami bukan mengomentari tapi menjawab dengan kerja," ulas dia.

Jawaban Mahyeldi, sontak membuat peserta sidang paripurna yang digelar Selasa (3/8) kemarin itu terdiam. Namun, anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas mengaku takjub dengan jawaban dan respon Gubernur Sumbar, karena terdapat kata 'malaikat' dan menyebut tugas gubernur tidak menjawab berita viral.

"Setuju saya dengan uraian Pak Mahyeldi di Paripurna tadi, dua catatan saya memang betul gubernur tidak malaikat. Kedua, soal tugas gubernur tidak menjawab berita viral, semoga saya dan DPRD Sumbar tidak gagal paham memaknainya," ujar HM Nurnas.

Galang Donasi

Sebelumnya, tiba-tiba pengelola Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang biasanya menangani pemeriksaan sampel hasil swab Covid-19, mengeluh. Sebuah pengumuman di dinding labor yang dipimpin Dr. Andani Ekaputra itu, menjadi ramai diperbincangkan publik sejak Rabu (3/8) kemarin.

Pengumuman itu berbunyi: "Mengingat belum adanya pendanaan dari Pemprov Sumbar, maka kami mohon donasi untuk setiap pengambilan swab yang dilakukan di FK Unand, untuk biaya consumables. Donasi tidak memaksa dan tidak ada ketentuan jumlah, terimakasih".

Para inisiator dan anggota WhatsApp Group (WAG) Kawal Covid-19 Sumbar spontan membuka donasi untuk membantu Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, Selasa (3/8/2021).

Mereka sedih dan terketuk hati setelah mengetahui, ternyata laboratorium yang dipimpin Dr Andani Eka Putra itu tidak mendapatkan pendanaan dari Pemprov Sumbar.

Para inisiator dan anggota GWA yang sejak awal pandemi mengawal penanganan Covid-19 Sumbar itu, terdiri dari para akademisi, politisi, profesional, tokoh masyarakat, kepala daerah dan jurnalis.

Sebelumnya, kendala anggaran juga sudah diungkapkan oleh Dr Andani Eka Putra ketika akan memeriksa spesimen untuk mengetahui apakah virus korona varian delta sudah masuk ke Sumbar atau belum.

Namun, itu belum bisa dilakukan karena terbentur anggaran. "Labor kita bisa melakukan itu. Kalau anggaran sudah ada, kita lakukan pemeriksaan," katanya.

Akademisi Unand Andri Rusta yang menjadi salah seorang inisiator menatakan, donasi dikirimkan ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1110008888667 atas nama.Sari Lenggogeni. Bukti transfer dikirimkan ke Andri dengan nomor WA: 081266682627. ■ **raihan**

'Melamar' di Agam

DARI HALAMAN 1

Dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Solok nomor 188.45-935-2020 tanggal 16 Desember 2020, sebanyak empat Sekretaris OPD yang ditunjuk sebagai PA adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Walikota Solok menunjuk Hendrizal, SH, MM, sebagai PA di Bappeda Kota Solok, kewenangan yang sejatinya diemban Jonnedi, SH, MM. Di Dinas Perhubungan, kewenangan Kadishub Drs. Asril, MM sebagai PA, diberikan kepada Drs. Azrul yang menjabat Sekretaris Dishub. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Drs. Dodi Osmon tidak mendapatkan kewenangan sebagai PA, karena kewenangannya diberikan kepada Drs. Mursal, Sekretaris Dispora. Di Dinas Lingkungan Hidup, kewenangan sebagai PA diberikan kepada Musyanti, SE, Sekretaris DLH yang "menggantikan" kewenangan Drs. Dedi Asmar.

Meski kewenangannya dikerdilkan, tidak ada reaksi dari empat Kepala OPD tersebut. Baik berupa tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun ke legislatif (DPRD Kota Solok). Hal ini diakui sejumlah Anggota DPRD Kota Solok. Bahkan dari tanggal SK (16 Desember 2020), hingga saat ini, sudah berjalan lebih dari 3 bulan.

"Hingga saat ini, secara kelembagaan, belum ada laporan ataupun pengaduan dari empat kepala OPD tersebut ke DPRD Kota Solok. Tentu, kita harus memiliki dasar yang kuat untuk memanggil atau mempertanyakan kebijakan Walikota Solok tersebut. Jika empat Kepala OPD itu tidak merasa dirugikan, tentu kami tidak bisa berbuat banyak," ujar Deni Nofri Pudung, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Solok.

■ **rijal islamy**

Pandemi

DARI HALAMAN 1

di Indonesia yang berada pada zona merah, termasuk di Sumbar.

"Penurunan aktivitas penerbangan mendorong penurunan tarif angkutan udara lebih lanjut oleh maskapai penerbangan. Harga komoditas mobil mengalami deflasi sebagai dampak kembali diterapkannya subsidi PPnBM sampai dengan 100% untuk mobil kategori <1500 cc dan kategori 1500 cc s.d 2500 cc dengan kandungan lokal tertentu hingga Agustus 2021 (sesuai dengan PMK No. 77 PMK 010 tahun 2021)," bebernya.

Wahyu merinci, kelompok lain yang mengalami deflasi pada Juli 2021 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat deflasi sebesar -0,07% (mtm) dan andil -0,02% (mtm). Deflasi pada kelompok ini disumbang oleh penurunan harga pada komoditas daging ayam ras dan ikan cakalang/ikan sisik dengan nilai andil deflasi masing-masing sebesar-0,10% (mtm) dan -0,02% (mtm). Komoditas daging ayam ras mengalami penurunan harga yang disebabkan oleh melimpahnya pasokan di masyarakat.

"Pembatasan jam operasional rumah makan dan restoran selama PPKM menyebabkan rendahnya permintaan dan tidak terserapnya pasokan daging ayam ras dari peternak.Sementara itu, komoditas ikan cakalang/ikan sisik tercatat mengalami penurunan harga akibat melimpahnya pasokan di pasar di tengah permintaan yang relatif stabil," jelas dia.

Sementara, deflasi lebih lanjut tertahan oleh inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai inflasi sebesar 0,35% (mtm) dengan andil 0,05% (mtm). Inflasi pada kelompok ini bersumber oleh kenaikan harga pada komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 0,05% (mtm). Bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga pada masa PPKM darurat sehingga mendorong kenaikan harga LPG di tingkat pedagang khususnya untuk LPG 3 kg.

"Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar secara aktif melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah terutama dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah Pandemi COVID-19. Sehubungan dengan adanya PPKM di Sumbar, TPID menyelenggarakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk memitigasi risiko inflasi pada masa PPKM maupun menjelang Hari Raya Idul Adha," ulas dia.

Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, kata Wahyu, beberapa langkah yang telah dilakukan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Di antaranya, menyelenggarakan Gelar Pangan Murah dari Dinas Pangan pada tanggal 14 Juli 2021 dengan subsidi harga sebesar 50 persen dan meningkatkan peran BULOG dalam menjaga persediaan beras dan komoditas pangan utama lainnya.

"Kemudian menyelenggarakan operasi pasar/KPSH oleh BULOG secara rutin untuk seluruh komoditas utama penugasan BULOG seperti beras, daging beku, minyak goreng, gula pasir, dsb untuk menjaga kestabilan harga, meningkatkan ketersediaan data dan informasi pasokan dalam rangka monitoring persediaan, melakukan koordinasi dengan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan hasil ternak untuk dapat menyerap kelebihan supply akibat peningkatan biaya transportasi ternak di masa PPKM," sambung Wahyu.

Selanjutnya, TPID Provinsi Sumbar juga mendorong peran Dishub dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pangan di tengah PPKM, meningkatkan peran TTIC Sumbar dalam melakukan distribusi bahan pangan melalui mobil box keliling, mendorong peningkatan aktivitas pembelian bahan pangan di TTIC Sumbar melalui Go-Shop dengan subsidi ongkir hingga Rp35 ribu, serta melakukan koordinasi dengan pedagang besar dan distributor komoditas strategis jika terdapat hambatan pada masa PPKM Darurat.

"Terakhir, TPID Provinsi Sumbar juga meningkatkan koordinasi dengan seluruh TPID Kabupaten/Kota dan TPID dari wilayah lain di luar Sumbar untuk mengantisipasi adanya keterbatasan pasokan pada masa PPKM Darurat ini. Ke depan, diharapkan sinergi dan koordinasi TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi daerah terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung," ujarnya. ■ **raihan al karim**

Masjid Agung

DARI HALAMAN 1

Islam namapak terlihat semarak.

Kini hampir tiap Kabupten/Kota di Sumbar memiliki semangat ingin punya masjid besar di daerahnya. Sebagai negeri tua Dharmasraya juga tidak lama lagi bakal memiliki Masjid Agung, ia akan menjadi ikon syiar Islam di tenggara Sumatera Barat itu. Masjid yang dibangun di atas lahan 67.193 meter itu dirancang untuk menjadi pusat peradaban agama Islam di daerah itu.

Masjid dengan dua lantai kemudian berdiri di Lintas Sumatera, tepatnya di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung diperkirakan dapat menampung 13 ribu jemaah.

Masjid Agung memiliki arsitektur yang begitu elok dimana memiliki empat kubah dan empat menara. Jumlah itu melambangkan filosofi adat Minangkabau yaitu 'Tau Jo Nan Ampek'.

Tau Jo Nan Ampek itu sendiri adalah, kato mandaki, kato mandata, kato manurun, dan kato malareng. Makna kata itu ialah seseorang harus pandai menjaga sikap kepada yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih kecil.

Masjid Agung juga menjadi penopang utama seluruh masjid dan surau yang berada di Dharmasraya. Menjadi tempat untuk menyiapkan generasi Dharmasraya yang religi.

Bahkan, untuk mempertahankan nilai setiap proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan di daerah itu, pemerintah setempat terus memantau perkembangan pembangunannya.

"Hal ini penting diperhatikan disamping

KUNJUNGI PADANG WAKO TERIMA KASIH KEPADA WAKAPOLRI

Hendri Septa: Kami Terus Ingatkan Warga Disiplin Prokes

Padang, Khazanah - Wali Kota Padang Hendri Septa menyambut baik atas adanya kunjungan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono ke Kota Padang.

Seperti diketahui, orang nomor dua di tubuh Polri tersebut menyambangi Kota Bingkuang dalam rangka kunjungan kerja (kunker) selama Selasa dan Rabu (3-4/8/2021).

Adapun agenda yang dilakukannya adalah meninjau beberapa tempat isolasi mandiri, Kongsi Covid-19 dan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di beberapa titik. Selain itu juga melakukan peninjauan terhadap proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 disertai menyerahkan bantuan sosial (bansos) Polri.

Tak lupa, Wakapolri juga turut menyerahkan bingkisan untuk tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 yang isolasi.

"Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan bapak Wakapolri yang tengah melakukan sejumlah agenda di Kota Padang. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat menyambut baik dan berterima kasih tentunya," ungkap Wali Kota Padang tersebut kepada wartawan di sela peninjauan yang dilakukan Wakapolri di Kantor Lurah Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Rabu (4/8/2021) pagi

Dalam kesempatan itu juga hadir Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto beserta Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/ Padang Kolonel Inf M.Ghoffar Ngismangil. Juga tampak Camat Padang Selatan Teddy Antonius beserta Lurah Mata Air Betty Ernita dan unsur terkait lainnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu mengaku bahwa pihak terus gencar mengingatkan kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (5M).

Disamping itu sambungnya, Pemko Padang sendiri juga akan terus melakukan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif lagi. Dengan kita disiplin menerapkan prokes, Insya Allah kita dapat menekan angka penyebaran Covid-19," kata Hendri Septa.

Sementara itu dalam penyampaiannya Wakapolri menyampaikan beberapa arahan dan motivasi bagi semua pihak terkait, jajaran Pemko Padang dan masyarakat Kota Padang. Ia pun turut memuji komitmen dan kepedulian warga Padang seperti mendirikan Posko PPKM Mikro di tiap RW dan kelurahan sebagai langkah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Saya kira jika kepedulian warga di sini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya sangat bagus. Sebab disini penerapan Prokes 5 M sudah dijalankan dengan baik," ujarnya.

Selanjutnya Wakapolri menekankan kedepannya warga Padang dapat terus menjalankan Prokes 5 M dan bagi pihak puskemas agar tetap menjalankan 3T dengan metode yang benar.

Diakui Wakapolri seluruh pihak mungkin sudah lelah menangani penyebaran virus Covid-19, Namun harus tetap semangat untuk terus berjuang memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

"Patuhi 5M dan Kuatkan 3 T. Serta lakukan Isolasi Mandiri dengan baik. Untuk itu edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar dapat meminimalisir," Jelas Wakapolri. **(adv)**

Hendri Septa berdiskusi dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono

Hendri Septa saat mendampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono meninjau lokasi isolasi mendiri di Kota Padang

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono didampingi Hendri Septa, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmantodan dan Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir berdislkusi dengan petugas kesehatan.

Hendri Septa bersama Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir menunggu kehadiran Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

HENDRI SEPTA APRESIASI MASYARAKAT LUBEG

Amimo Ikuti Gebyar Vaksin Covid-19 Tinggi

Padang, Khazanah - Wali Kota Padang Hendri Septa mengapresiasi tingginya animo masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung mengikuti Gebyar Vaksinasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Wako Hendri Septa saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kantor Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Rabu (4/8/2021).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih kepada Camat Lubeg atas terlaksananya vaksinasi massal ini," ujar Wako Hendri Septa usai meninjau proses vaksinasi di kantor Camat Lubeg.

Wali Kota menyampaikan, gebyar vaksin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Lubeg ini tentunya akan mempercepat pencapaian target vaksinasi di Kota Padang.

Dimana pada saat ini baru 185 ribu warga Kota Padang yang divaksin dari target sebanyak 720 ribu orang. Masih ada sekitar 600 ribu orang yang mau dicapai.

""Alhamdululillah pada hari ini di Kecamatan Lubeg akan ada 800 orang yang akan menjalani vaksinasi dalam empat hari ke depan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah mau divaksin," terang Wako.

Hendri menambahkan, pada saat ini antusiasme masyarakat untuk divaksin sangat tinggi. Berdasarkan informasi yang ia terima ada 6000 orang warga Kota Padang yang menjalani vaksinasi setiap harinya.

"Kita berharap dengan meningkatnya animo masyarakat untuk menjalani vaksinasi ini dapat mencapai herd immunity untuk wilayah Kota Padang," sebut Wako didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.

Sementara itu, Camat Lubug Begalung Reza Syafani mengatakan, bahwa program vaksinasi yang dilakukan di Kecamatan Lubeg ini dilaksanakan selama empat hari.

"Kita sudah mulai vaksinasi sejak kemarin dan akan berlanjut sampai tanggal 6 Agustus 2021. Alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi, pada hari kemarin kita target 200 orang namun yang ikut vaksinasi 408 orang," ungkap Camat.

Reza menambahkan, untuk menarik minat masyarakat agar mau divaksin pihaknya menyiapka doorprize berupa baju kaos dan memberikan hadiah kepada ketua RT/TW berupa menginap di hotel berbintang bagi yang paling banyak memobilisasi warganya untuk divaksin.

"Kita berharap dengan adanya usaha seperti ini, sasaran program vaksinasi sebanyak 720 ribu orang dapat tercapai, dan sekarang baru mencapai sebanyak 185 ribu orang," harapnya.

Dikesempatan itu, Wali Kota Padang Hendri Septa juga memberikan motivasi dan hadiah kepada tenaga kesehatan peserta Gebyar vaksinasi Covid-19 Kecamatan Lubeg. N faisal budiman

Kepada masyarakat, Wako menyampaikan bahwa saat ini di negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura dan lainnya saat ini warganya sudah bisa membuka masker. Kenapa demikian? karena 90 persen warganya sudah melakukan vaksinasi.

"Untuk itu saya mengajak masyarakat Kota Padang mari ikuti vaksinasi. Ajak keluarga dan saudara kita untuk vaksin. Sehingga kita bisa nantinya seperti negara-negara lain di dunia yang sudah bisa membuka masker," pungkas

Walikota Padang Hendri Septa didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis saat mengunjungi kegiatan vaksin di Kecamatan Lubeg.

PERJUANGAN INDONESIA DI OLIMPIADE 2020 TOKYO TUNTAS

Terima Kasih Patriot Olahraga!

Jakarta, Khazanah- Kontingen Indonesia sudah selesaikan seluruh jadwal pertandingan pada Olimpiade Tokyo 2020. Sebanyak 28 atlet Indonesia telah menunaikan tugas negara mereka.

Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman mengucapkan sanjungan kepada perjuangan seluruh anggota Tim Indonesia, patriot olahraga yang mewakili bangsa dan negara.

"Mereka berangkat dan bertanding sudah melewati kualifikasi yang ditentukan masing-masing federasi internasional cabang olahraganya. Dengan kata lain, mereka adalah atlet-atlet terbaik dunia," ucap Marciano di Jakarta.

"Patriot Olahraga Prestasi yang dapat bertanding pada ajang Olimpiade adalah atlet terbaik dunia yang didukung pelatih serta induk cabang olahraga yang hebat, mereka adalah kebanggaan bagi bangsa dan negara karena melewati kualifikasi yang tak mudah," sambungnya.

Enam atlet diantara 28 0rang bahkan meraih medali yang membanggakan Indonesia. Total Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu dari dua cabang olahraga, angkat besi dan bulu tangkis.

Atas perjuangan dan usaha keras para Patriot Olahraga Prestasi, Marciano menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi anak bangsa; seluruh atlet, pelatih, ofisial, induk cabang olahraga, dan Ketua Kontingen Tim Indonesia. yang mewakili Indonesia pada ajang Olimpiade.

"Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peraih medali Olimpiade Tokyo 2020 dan juga seluruh Patriot Olahraga kebanggaan Indonesia," katanya.

Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tentunya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Mewakili masyarakat olahraga prestasi, terutama yang menaungi pembinaan olahraga prestasi dan mencetak atlet juara, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menpora Zainudin Amali yang sangat memperhatikan serta mendukung atlet Indonesia. KONI Pusat beserta seluruh organisasi Induk Cabang Olahraga serta KONI Provinsi menjadi lebih mudah dalam melakukan pembinaan atlet berkat penghargaan yang baik dari pemerintah." sambungnya.

Dia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI). "Kepada KOI, saya sampaikan terima kasih karena telah memastikan keikutsertaan para Patriot Olahraga Prestasi Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Keikutsertaan pada multievent Olimpiade menjadi pelengkap pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan oleh KONI dan organisasi cabang olahraga," tambahnya.

Kepada atlet yang belum meraih hasil sesuai harapan, dia mengajak Patriot Olahraga Prestasi bangkit dari kesedihan dan kekecewaan.

"Adanya beberapa hasil yang tidak sesuai harapan itu wajar, dalam pertandingan olahraga ada kemenangan, kekalahan, serta kemenangan yang tertunda," pesannya.

"Sadarlah kalah dan menang tidak abadi. Oleh karenanya, mari kita bangkit dari kesedihan, lakukan evaluasi yang baik, berlatih lebih baik lagi dan tak sungkan belajar dari lawan kita yang lebih baik. Yakinlah pada kompetisi berikutnya Bendera Merah Putih akan berkibar diiringi Lagu Indonesia Raya," ajaknya.

Marciano menghimbau atlet yang belum menuai prestasi di Olimpiade untuk membuktikan kekalahan yang terjadi adalah kemenangan yang tertunda. Seluruh pihak diminta untuk saling memperkuat guna mendorong olahraga prestasi lebih baik lagi.

"KONI Pusat juga berupaya para atlet berprestasi kembali berhasil di masa pensiunnya. Oleh karenanya, KONI Pusat yang telah bekerja sama dengan London School of Public Relations (LSPR) memberikan beasiswa pendidikan sebagai wujud perhatian terhadap masa depan atlet. Beasiswa program S1 atau S2 diharapkan dapat membuat Patriot Olahraga Prestasi Indonesia berprestasi usai menjadi atlet, berkat wawasan serta pengetahuan," tutup Marciano. ■

PARIWARA

ANGGOTA DPRD AGAM DAPIL III RESES

Bahas Bidang Pendidikan

Reses pada Masa persidangan tiga di tahun 2021 ini. Ketua DPRD Novi Irwan hadir anggota DPRD dari dapil III Hendrizal, Fairisman, Edward, Mardanis, dan Syafruddin melakukan kunjungan reses ke dapil tiga Kecamatan Kamang Magek. Selasa (03/08).

Pada reses ke dapil kali diterima di kantor Camat Kamang Magek yang diterima Camat Rio Eka Putra beserta jajaran juga di hadiri Walinagari, Jorong, ketua Bamus, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan ketua pemuda sekecamatan Magek guna untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kamang Magek.

Camat Kamang Magek Rio Eka Putra meminta dukungan pada ketua DPRD dan anggota DPRD dari dapil III agar mendukung pembukaan jalan dari Tilatang Kamang ke Kecamatan Palupuh melalui Pauh Kamang Mudiak yang sudah di bangun melalui anggaran PNPM.

Dr Novi Irwan,S.Pd.MM ketua Dprd Agam dari dapil III

Selain itu Doni ketua pemuda Kamang Hilia, mengatakan terkait dengan pendidikan dengan menjamurnya sekolah swasta yang fasilitas yang lengkap kami meminta di perhatikan agar sekolah negeri bisa bersaing dengam sekolah swasta.

Ketua DPRD Agam Dr Novi Irwan,S.Pd.MM dalam sambutannya mengatakan reses kali ini guna menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kamang Magek, untuk guna pembangunan kecamatan Kamang Magek kedepannya, dan beberapa waktu yang lalu DPRD bersama pemerintah kabupaten Agam telah menyetujui ranperda RTRW dan RPJMD menjadi perda, ini tidak terlepas dari peran niniak mamak.

"Terkait dengan jalan Tilatang Kamang Palupuh via Pauh kami akan mendukung untuk prosesnya ke provinsi terkait tindak lanjut pembangunan jalan ini , tutur Novi Irwan.

Disamping itu, Novi Irwan jugs menjelaskan masalah pendidikan di kabupaten Agam memang sekarang ini Kabupaten Agam kekurang guru kurang lebih seribu orang , serta modernisasi bidang belajar mengajar, dan di tambahkannya pelajaran di bidang agam seperti Tahfiz dan muatan lokal lainnya.

Edwar Dt Manjuang anggota Dprd Agam dari dapil III juga menjelaskan Maju dan mundur pendidikan di Kabupaten Agam tergantung dengan SDM dan fasilitas pendidikan sekolah serta kerjasama sekolah dengan komite serta wali murid." tutup Edward. **(Heppy Kusnandar)**

ANGGOTA DPRD AGAM DAPIL II

Tampung Aspirasi Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Ampek Nagari menitipkan sejumlah harapan pembangunan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam Dapil II.

Aspirasi itu disampaikan saat anggota dewan melakukan reses di Kantor Camat Ampek Nagari pada Selasa (3/8).

Mewakili masyarakat, Sekretaris Kecamatan Ampek Nagari, Hendra mengatakan para wakil rakyat Dapil II diharapkan mampu meningkatkan laju pembangunan di seputar wilayah Ampek Nagari.

"Ini harapan masyarakat kita, para konsituen legislator Dapil II mengharapkan betul wakil rakyat mereka dapat meningkatkan akselerasi pembangunan, baik fisik maupun pengembangan sumber daya mereka," katanya.

Lebih spesifik dijelaskan, item pembangunan yang dinilai warga medesak atau diutamakan yakni peningkatan daerah irigasi Batang Bawan, Batu Palano dan Batang Sitanang.

Kemudian katanya, memperhatikan kelangsungan pendidikan anak nagari, terutama di masa pandemi. Termasuk mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 Nagari demi menekan laju penularan wabah.

"Lalu, pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan Ampek Nagari. Baik itu pembangunan pasar, jalan, penanganan kawasan rentan bencana dan sebagainya," papar Sekcam.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, Hasneril menyampaikan sejumlah wakil rakyat dari Dapil II sengaja turun menyambangi konstituennya guna menampung aspirasi mereka.

Disebutkannya, legislator yang langsung menemui masyarakat itu antara lain Rizki Abdillah Fadhal, Zulpardi, Ar Yutinof, Jondra Marjaya dan Yopi Eka Androni.

"Anggota dewan yang hadir pada reses itu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat selanjutnya," ucap Hasneril.

Anggota DPRD Agam Dapil 2, di antara orangnya Ar Yutinov, Jon Ramajaya, Zulprdi

Turut hadir dalam pertemuan reses bersama wakil rakyat itu Wali Nagari se Kecamatan Ampek Nagari, Badan Musyarawah (Bamus), Bundo Kanduang dan tokoh masyarakat setempat.

(Epy kusnandar)

Anggota DPRD Agam Nesi Harmita saat memberikan keterangan

DAPIL I LAKUKAN RESES KE KECAMATAN LUBUK BASUNG

Kami Himpuan Aspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Agam daerah pemilihan (Dapil) I melakukan reses ke Kecamatan Lubuk Basung, Selasa (3/8). Reses tersebut dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan pembangunan di Kecamatan Lubuk Basung.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lubuk Basung tersebut dipimpin Anggota DPRD Agam Antonis, dihadiri Anggota DPRD Agam Noveri Edios, Gema Saputra, Nesi Harmita, Epi Suardi, dan M. Ater. Pada kesempatan itu dihadiri Camat Lubuk Basung, Harmezi, Wali Nagari se Kecamatan Lubuk Basung, KAN, Bamus, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Agam, Noveri Edios mengatakan tujuan dari reses tersebut dalam rangka menjemput dan menghimpun aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung, sehingga nantinya akan dibawa ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Sementara itu, Antonis juga mengatakan meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pihaknya akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, walinagari, Bamus dan Tokoh Masyarakat menyampaikan beberapa aspirasinya seperti jalan jalur dua dari Simpang Gudang ke Balai Salasa, pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan pasar impres Padang Baru, serta mengharapkan kegiatan prioritas yang ditunda karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk segera dilaksanakan.**(Epy Kusnandar)**

Ternyata Pelanggar Prokes Masih Tetap Tinggi

Lubuk Sikaping, Khazanah— Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sebanyak 14.898 kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama operasi yustisi yang digelar dari Januari hingga Juli 2021.

"Dari 14.898 kasus itu didominasi pelanggaran seperti tidak memakai masker saat mengendarai sepeda motor dan mobil di jalanan," kata Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman, Aan Afrinaldi di Lubuk Sikaping, Rabu (4/8).

Ia mengatakan tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di daerah itu, karena tim gabungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat aktif dalam melakukan operasi yustisi, dan termasuk lima besar daerah paling aktif melakukan operasi sesuai laporan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Kepada para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 diberikan sanksi, namun sanksi sampai ke ranah pidana belum ada, baru sebatas sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan lainnya yang berada di lokasi sekitar operasi yustisi.

Setelah menjalani sanksi sosial diberikan masker secara gratis oleh Tim Gabungan Operasi Yustisi untuk langsung dipakai baru diperbolehkan pergi.

Ia menyebutkan selain penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19, pihaknya juga menyampaikan imbauan secara persuasif ke lokasi fasilitas umum, agar warga menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan patuh saat dilakukan penertiban.

Tim Gabungan Operasi Yustisi antara lain Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Subdenpom ini digelar dua kali dalam seminggu di 12 kecamatan dengan waktu, dan lokasi yang berbeda-berbeda.

Selama operasi yustisi, baru lima orang pengendara pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang dikenai denda sebesar Rp100 ribu per orang akibat tidak memakai masker, selebihnya hanya sanksi sosial dan teguran. Sesuai aturan uang denda itu masuk ke kas daerah Kabupaten Pasaman.

Sementara itu, sebanyak 23 warga terjaring operasi yustisi yang digelar di kawasan Pasar Biaro, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Selasa (3/8).

Akibat melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) dalam penanganan Covid-19 tersebut, puluhan orang yang terjaring razia itu langsung di sidang di tempat yang dilakukan secara virtual dengan melibatkan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Syafrizal mengatakan, dari 23 pelanggar prokes yang disidang itu, sebanyak 13 orang dikenakan sanksi sosial. Lalu, sebanyak 10 orang denda di tempat.

"Sanksi sosial yang kita berikan yaitu membersihkan fasilitas umum, kalau dendan, itu Rp100 ribu per pelanggar," ungkapnya.

Tidak hanya itu, kata Syafrizal, selain sanksi administrasi dan denda, sanksi juga ada dalam bentuk kurungan.

"Ini tak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk semua kalangan," katanya ■ **Yunefrizal/ Heppy Kusnandar.**

PENGURUS TERPILIH KSU AIR BANGIS SEMESTA

374 Hektar Lahan Plasma Dipertanyakan

Simpang Empat, Khazanah— Sengketa lahan plasma sawit seluas 374 hektar di Pasaman Barat masih terus berlanjut. Pengurus terpilih 374 Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta justrus mempertanyakan penyerahan lahan tersebut kepada pemerintah oleh pengurus lama.

LAHAN- Sengketa lahan plasma sawit seluas 374 hektar di Pasaman Barat masih terus berlanjut. Pengurus terpilih 374 Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta justrus mempertanyakan penyerahan lahan tersebut kepada pemerintah oleh pengurus lama **(foto: Ist/net).**

Pengurus terpilih plasma 374 Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat mempertanyakan adanya penyerahan lahan plasma seluas 374 hektare kepada pemerintah dari pengurus lama tanpa melalui keputusan atau persetujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Kami mempertanyakan penyerahan lahan itu pada 15 Februari 2021 dihadapan penyidik Polres Pasaman Barat dengan alasan lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi," kata Sekretaris Terpilih KSU 374 Air Bangis Semesta Effendi Efendra di Simpang Empat, Selasa.

Menurutnya alasan penyerahan lahan itu tidaklah masuk akal, sebab lahan plasma seluas 374 hektare itu adalah milik anggota KSU 374 Air Bangis Semesta yang berjumlah 3.768 orang.

"Lahan itu sudah dimanfaatkan selama kurang lebih 15 tahun yang dikelola melalui wadah koperasi," sebutnya.

Ia mengatakan sejak tahun 2018, pengurus tidak pernah lagi mengadakan RAT yang akhirnya berujung kepada mosi tidak percaya anggota kepada pengurus yang lama.

Hal itu mengakibatkan lahan seluas 374 hektare terlantar dan tidak dipanen karena arogansi pengurus yang tidak bersedia untuk diawasi oleh perwakilan anggota.

Atas dasar itulah, katanya saat ini pengurus baru yang terpilih melalui RAT Luar Biasa pada Kamis (29/7) meminta kepada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk memberikan titik terang mengenai status lahan plasma 374 yang berada dibawah binaan bapak angkat PT Bintara Tani Nusantara (BTN).

Sebab, katanya status lahan plasma itu adalah legal yang didukung dengan legalitas yang jelas seperti adanya surat perjanjian kerjasama antara PT BTN dengan KSU Air Bangis Semesta dalam pembangunan kebun plasma pada 30 Agustus 2003.

Kemudian, adanya izin prinsip untuk pembukaan lahan kebun plasma Nagari Air Bangis tanggal 7 Juli 2004 dan adanya rekomendasi kelayakan pembangunan kebun oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 Desember 2004.

Setelah itu adanya rekomendasi pelaksanaan land clearing oleh Bupati Pasaman Barat tanggal 21 Desember 2004 serta pencairan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan nomor akta perjanjian kredit Nomor 169 tanggal 23 Februari 2005.

Dengan demikian, katanya hal tersebut telah memenuhi syarat adanya pembangunan kebun plasma dan juga sah sebagai legalitas kebun.

"Akan tetapi seandainya menurut instansi terkait lahan 374 itu berada di kawasan hutan produksi tentu tidak serta-merta menerima begitu saja, karena kami punya legalitas yang jelas dari awal perjanjian dengan PT BTN," tegasnya.

Pihaknya juga memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik proses terjadinya pembangunan plasma 374 itu.

Ia menekankan kalau memang itu adalah daerah kawasan hutan produksi, pihaknya berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas proses terjadinya pembangunan plasma 374 itu.

"Jangan warga atau anggota plasma kami yang ditangkap ketika kami menuntut hak kami sebagai anggota plasma yang jelas-jelas itu adalah hak kami sesuai kesepakatan dengan pihak PT BTN. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah daerah agar menindaklanjuti hal ini sampai tuntas," tegasnya.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

Namun ia berharap agar apa yang sudah menjadi hak mereka yaitu 10 persen dari total lahan yang dijadikan perkebunan oleh PT BTN menjadi lahan kebun plasma masyarakat untuk diberikan. Karena disana bergantung hidup orang banyak dan keluarganya masing-masing.

Pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hal itu memang sudah diputuskan sebagai kawasan hutan produksi.

Namun, ia meminta agar hak mereka yaitu lahan kebun plasma seluas 374 hektare agar diberikan gantinya ■ **Sutan Pamenan.**

Wali Nagari Diduga Lakukan Penggelapan

Kampung Dalam, Khazanah— Diduga melakukan tindakan penggelapan, seorang oknum wali nagari di Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Padang Pariaman, ditahan polisi.

DITAHAN- Diduga melakukan tindakan penggelapan, seorang oknum wali nagari di Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Padang Pariaman, ditahan polisi **(foto: ist/net).**

Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Kampuang Dalam, AKP Kasman kepada *covesia.com* pada Selasa (3/8).

"Iya, wali nagari itu ditahan atas kasus dugaan penggelapan uang milik Yayasan Arisal Aziz, sebagai mana pasal yang disangkakan 372 KUHPidana," sebut Kasman.

Lanjut Kasman, kejadian penggelapan itu diduga dilakukan wali nagari tersebut pada Januari 2018 lalu.

Kasman menyebutkan, saat ini wali nagari dengan inisial nama R (40) itu, sudah ditahan di Mapolsek V Koto Kampung Dalam.

Dikatakan Kasman, oknum wali nagari itu ditahan pihaknya pada Senin malam (2/8) atas laporan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Yayasan Arisal Aziz.

"Dalam kasus ini, terlapor (wali nagari) yang juga merupakan sekretaris Yayasan Arisal Aziz. Wali nagari ini ditugaskan membeli tanah untuk yayasan namun sudah tiga tahun lamanya tidak ada kejelasan terkait tanah yang dibeli tersebut, begitupun dengan laporan keuangannya," ungkap Kasman.

Kasman mengatakan, total uang yang diberikan yayasan senilai 500 juta rupiah, namun sebanyak 72 juta rupiah tidak jelas ke mana arahnya.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan. Terlapor sudah ditahan untuk proses penyelidikan," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari telapor, bernama Suspida Lastri menepis dugaan kalau kliennya R ini melakukan penggelapan.

"Kami telah memasukan gugatan atau pembelaan atas klien kami yang diduga melakukan penggelapan pembelian tanah seluas 18 hektare itu," sebut Suspida Lastri.

Kata Suspida Lastri, kliennya tidak terbukti bersalah atas kasus ini karena mereka mempunyai bukti atas pembelian tanah dan hal lainnya.

"Uang dan hal lainnya telah dibayarkan oleh klien kami, kami ada kwitansi dan bukti lainya. Namun kita buktikan saja di pengadilan nantinya," katanya ■ **Syafrial Suger.**

RSUD Solsel Siapkan Tambahan Nakes

Padang Aro, Khazanah— Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) bakal menyiapkan tambahan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat untuk menambah daya tampung pasien terpapar Covid-19.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solsel, Putra Nusa mengatakan pihaknya memang sudah menerima permintaan usulan secara lisan untuk penambahan nakes di RSUD Solsel.

"Iya, usulan sudah disampaikan secara lisan oleh pelaksana tugas direktur RSUD langsung pada pak Bupati Khairunas. Dan saat ini kita menunggu usulan tersebut berupa surat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai instruksi pak Bupati," kata Putra Nusa, Rabu (4/8).

Putra Nusa menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan nakes di RSUD Solsel tersebut, pihaknya bakal memberdayakan nakes yang ada. Baik itu tenaga dokter maupun perawat. "Tidak ada proses rekruitmen namun Kita akan manfaatkan nakes di puskesmas-puskemas yang ada," tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Solsel, Tony Hardian mengatakan bahwa pihaknya bakal menambah daya tampung pasien Covid-19.

Untuk kebutuhan tenaga medis, ia mengusulkan penambahan 3 dokter umum dan 9 perawat. Tony menambahkan, saat ini RSUD Solsel memiliki 3 unit ventilator yang berfungsi dan 2 unit konsentrator oksigen "High Flow Nasal Cannula OH 60A".

"Pak Bupati sudah mengintruksikan kepala BKPSDM untuk mengakomodir permintaan RSUD. Dan untuk ruangan insyaallah hari ini sedang dipersiapkan," kata Tony Rabu (4/8).

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) bakal menyiapkan tambahan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat untuk menambah daya tampung pasien terpapar Covid-19.

Selain itu, kebutuhan oksigen medis mengalami peningkatan 100 persen di RSUD Solok Selatan.

Menurut Tony untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, pihaknya juga sudah mengirimkan permintaan generator oksigen ke Kementerian Kesehatan RI sekitar sebulan lalu. Apabila RSUD memiliki generator oksigen maka bakal bisa melakukan isi ulang oksigen untuk membantu pasokan.

TAMBAH- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bakal menyiapkan tambahan tenaga kesehatan di RSUD setempat untuk menambah daya tampung pasien terpapar Covid-19

Dia menyadari kondisi daerah Solsel cukup jauh dari pusat provinsi Sumbar, butuh waktu sekitar 5 jam perjalanan darat.

"Belum lagi nanti ada bencana alam seperti longsor, tentunya akan menghambat kelancaran distribusi ke Solsel. Semoga saja permohonan generator oksigen bisa secepatnya terealisasi," sebut Tony. ■ ***/Novrizal Sadewa.**

Langkan

Balai Wartawan Disemprot

Payakumbuh, Khazanah— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di Kantor Balai Wartawan, Rabu (4/8).

Penyemprotan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dan berjaga-jaga dari merebaknya virus Corona, ditambah angka kasus positif yang semakin meningkat dan angka kematian cukup tinggi di Kota Payakumbuh.

Kepala BPBD Kota Payakumbuh Erizon melalui Sekretaris Hermanto menyampaikan pihaknya memenuhi permintaan dari salah seorang anggota Balai Wartawan, yakni Jefri alias Bule, wartawan Koran Harian Singgalang yang beberapa hari lalu bertemu dengannnya di balai kota.

"Kami dari BPBD siap selalu memberikan pelayanan, semoga kita semua bisa terhindar dari terpapar Covid-19, kata Hermanto alias Pak Kumis.

Pengurus dan anggota Balai Wartawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memenuhi permintaan mereka untuk melakukan penyemprotan disinfektan di tepat mereka biasa bergulat dengan tinta, untuk bisa selalu menyajikan pemberitaan kepada masyarakat.

"Terimakasih BPBD Payakumbuh, semoga silaturahmi dan sinergi selalu terjaga untuk kedepannya," kata Joli, wartawan seorang media *online* ■ **Lili Yuniati.**

Ditangkap Edarkan Narkoba

Padang, Khazanah— Polisi menangkap mantan pekerja rumah makan di Padang bernama Al itu ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu.

Kanit Satres Narkoba Polresta Padang Ipda Syawal mengatakan, pelaku merupakan warga Purus, Kecamatan Padang Barat, Padang.

"Pelaku ditangkap setelah kami melakukan penyamaran sebagai pembeli," kata Syawal, Rabu (4/8). Syawal menambahkan, Alberto diamankan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat jika pelaku mengedarkan sabu.

Berbekal dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian.

Polisi, kata Syawal, kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu. Setelah melakukan perjanjian, pertemuan dilakukan di pinggir Jalan Raya Kurao Pagang, Nanggalo, Kota Padang.

"Dari hasil penggeledahan, kami amankan satu paket kecil narkoba sabu yang disimpan di dalam kantong celana," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjadi kurir sabu karena telah diPHK di salah satu rumah makan Padang daerah Nanggalo. "Pelaku mendapat barang dari salah seorang napi di Lapas Muara Klas II A Padang," katanya.

Saat ini, pelaku sudah ditahan di Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara ■ ***/Novrizal Sadewa.**

PUAN DKK KRITIK JOKOWI SOAL PENANGANAN PANDEMI

Bukti PDIP Ogah Disalahkan?

Jakarta, Khazanah-- Pemerintah pusat diduga tidak melibatkan partai koalisi termasuk PDIP dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19. Hal itu menyusul masifnya kritikan kepada Presiden Jokowi dari sejumlah politikus PDIP, seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu.

"Kalau distribusi tanggung jawab itu terutama untuk hal-hal yang dianggap darurat dan penting hanya berkisar pada orang yang itu-itu saja. Karena selama ini soal penanganan pandemi ini kalau enggak Pak Luhut, ya, Airlangga, kan," kata pengamat politik Adi Prayitno, Rabu (4/8).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menduga bahwa ada kecemburuan secara politik di dalam internal koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Soal kinerja pemerintah, soal penanganan pandemi ini kan dianggap satu paket kegagalan PDIP dan pemerintah sebagai partai pengusung," ujar Adi.

Artinya, menurut Adi, dengan mengkritik secara terbuka, PDIP ingin menjelaskan kepada publik bahwa yang dilakukan pemerintah itu tidak sepenuhnya suara PDIP.

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.

Menurut Effendi, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.

"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi, Minggu (1/8).

Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.

"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.

Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.

Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.

"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton, Rabu (4/8).

Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).

"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar alumnus Universitas Indonesia itu.■ **ryn/jpn**

Pemprov dan DPRD Sumbar Sepakati Tiga Perda

Padang, Khazanah-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna yang digelar Selasa (3/8) lalu.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi kemarin mengatakan, ketiga Ranperda yang disepakati adalah Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Kemudian Perda Penghormatan dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas dan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. "Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, tiga Ranperda itu bisa kita sepakati bersama," kata dia.

Ia mengatakan, untuk Ranperda RPJMD 2021-2026 seluruh fraksi telah memberikan pendapat dan menyetujui, meski ada sejumlah catatan yang disampaikan

Sementara dua Perda sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan ada penyempurnaan dan telah dilakukan Komisi II dan Komisi IV. "Jadi ketiganya sudah disepakati dan akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti," kata dia.

SEPAKAT-- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, disaksikan segenap unsur pimpinan DPRD Sumbar, saat menandatangani nota kesepakatan tiga Ranperda menjadi Perda Provinsi Sumbar, pada sidang paripurna DPRD setempat, Selasa (3/8). ANTARA

Sementara Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi DPRD Sumbar yang telah memberikan saran dan dukungan hingga Perda RPJMD ini selesai yang digarap sejak Mei 2021.

"Capaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dituangkan dalam Perda ini memuat untuk mewujudkan tujuh program yang akan dilaksanakan," kata dia.

Sementara untuk Perda penghormatan hak penyandang disabilitas akan membantu agar penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. "Melalui perda ini semua akan lebih terarah dan terencana dengan baik," kata dia.

Begitu juga Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan mampu mengoptimalkan pendapatan nelayan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2018 potensi perikanan Sumbar mencapai 560 ribu ton namun yang didapat baru 260 ribu ton.

"Hal ini dipengaruhi sejumlah hal mulai dari terbatasnya pengetahuan nelayan, sarana, modal nelayan dan perlu dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan kerja mereka di laut," kata dia.■ **Jer/ant**

RIUH POSTER UCAPAN SELAMAT GREYSIA/APRIYANI DARI POLITISI

Pencitraan untuk Mengerek Popularitas Semata

Jakarta, Khazanah-- Sejumlah politikus hingga pejabat berlomba-lomba mengucapkan selamat dan suka cita atas keberhasilan atlet Indonesia, Greysia Polii/ Apriyani Rahayu meraih medail emas bulutangkis ganda putri pada Olimpiade Tokyo 2020. Ucapan selamat riuh di media sosial melalui poster lengkap dengan potret wajah para politikus.

Namun cibiran banyak datang dari pengguna media sosial. Selain dinilai berlebihan, para politikus dan pejabat tersebut dinilai tak punya andil langsung di balik keberhasilan ganda putri Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Apalagi jika ada poster yang memuat foto politikus, lebih besar dari foto Greysia/Apriyani sendiri.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan langkah menunggangi kemenangan para atlet untuk kepentingan politik merupakan hal sangat menjengkelkan.

"Menunggangi kemenangan para atlet seperti Gresya/Apriyani untuk kepentingan politik tentu sangat menjengkelkan," kata Lucius, Rabu (4/8).

Menurutnya, langkah tersebut tak jauh berbeda dengan langkah para politikus yang menunggangi pandemi Covid-19 dengan menyebarluaskan berbagai poster berisi pesan soal kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan yang menonjolkan foto dirinya sendiri.

SEJAK beberapa terakhir, ramai bermunculan poster dan stiker-stiker ucapan selamat dari para politisi atas raihan medali emas pasangan ganda putri Indonesia, Greysia/ Apriyana. Namun tak disangka, aksi para politisi itu justru berbuah cibiran. IST

Dirinya juga melihat ada nilai berbeda antara kepentingan politik para politisi dibandingkan kemenangan Greysia/Apriyani yang cenderung bertolak belakang yaitu kemenangan ganda putri tersebut yang diperoleh lewat sebuah perjuangan dilandasi sportivitas.

Langkah para politikus itu, kata dia, menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan momentum kemenangan Greysia/Apriyani sehingga memperlihatkan ketidakjujuran dan ketidaktulusan.

"Para politikus tampaknya memang sudah cukup lama tak memiliki momen untuk mempromosikan diri dan partai politik mereka. Situasi pandemi membuat ikhtiar politisi agar lebih dikenal jadi terhambat," katanya.

Lucius juga menilai langkah para politikus yang marak mengunggah poster ucapan selamat kepada Greysia/Apriyani juga terkait dengan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mencari simpati publik karena para politikus menyadari bahwa bulu tangkis merupakan salah satu olahraga kebanggaan hampir seluruh masyarakat Indonesia.

"Waktu terus berjalan dan di depan mata Pemilu 2024 akan terjadi. Ketika satu momen besar kemenangan Greysia/Apriyani datang, para politisi langsung bereaksi karena menyadari betapa kebanggaan akan kemenangan sepasang atlit bulu tangkis itu menjadi kebanggaan seluruh bangsa," tuturnya.

Pencitraan Demi Popularitas

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai para politikus dan pejabat itu sekadar mendompleng kesuksesan dua atlet tersebut. Kuat motif pencitraan untuk mengerek popularitas semata.

"Ini juga bagian mencari dukungan publik, imaging politik," kata Jerry saat dihubungi, Rabu (4/8).

Jerry menilai, poster-poster dari politikus itu tidak akan terlalu berpengaruh banyak ke tingkat elektabilitas mereka.

Ia menyebut para politikus itu mencari kesempatan dalam kesempitan. "Biar viral dan dikenal netizen atau youtuber. Kalau politisi sudah punya nama, paling mereka ogah dengan cara seperti ini," ujarnya.

Jerry menilai penyebaran poster itu justru menjadi tidak etis apabila tujuannya hanya kepentingan politik meski jadi hak merek sebagai pengguna media sosial. "Saya sarankan lebih baik anggaran yang dipakai bikin poster bisa disumbangkan buat atlet yang berprestasi," tuturnya.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio di sisi lain menilai poster-poster tersebut sekadar mengikuti tren dan usaha mereka untuk meningkatkan popularitas.

"Itu ngikutin tren aja. Berusaha untuk meningkatkan popularitas, tapi kalau semuanya (mengucapkan), banyak, ya jadi enggak kelihatan popularitasnya, enggak unik," tutur Hendri.■ **ryn**

Anak Muda Perkuat Kapasitas Parpol

YUSR

Padang, Khazanah-- Peran partai politik (parpol) perlu diperkuat untuk regenerasi politik agar kalangan anak muda dapat masuk ke dunia politik dan menjadi representasi atau perwakilan di berbagai level.

"Perlu memperkuat peran parpol, terutama untuk regenerasi politik," kata Founder Cantigi Institute Padang, Yusril Latif, SHI Rabu (4/8).

Di tengah pelaksanaan demokrasi yang cenderung bersifat prosedural, Latif menyatakan representasi anak muda dapat menguatkan kapasitas parpol dan pranata politik yang menjadi salah satu faktor penting meningkatkan kualitas demokrasi yang substansial.

Owner Cantigi Tours itu juga menyebutkan, bahwa capaian indeks demokrasi Indonesia yang terus meningkat, sesungguhnya menjadi indikasi awal bahwa sudah saatnya anak muda berada dalam jalur yang benar menuju arah demokrasi yang lebih substansial.

Politisi PPP Kota Padang itu menekankan pentingnya pendidikan politik untuk anak muda agar ketika nanti mendapatkan fasilitas dalam dunia politik, mereka dapat menunjukkan kemampuan sebagai aktor politik, maupun kader parpol yang berkualitas, bermoral dan berkarakter.

Selain itu, Latif mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat dalam demokrasi menjadi faktor penentu. Upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap parpol menjadi penting untuk dilakukan karena erosi kepercayaan dalam dunia politik tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.

"Apalagi kalau sampai anak mudanya jadi semakin apatis terhadap dunia politik dan malah tidak mau berpartisipasi secara aktif untuk masuk ke dalam sistemnya," katanya.

Kecenderungan itu, kata dia, menjadi tantangan bagi anak-anak muda yang ada di dalam dunia politik untuk ikut meningkatkan kepercayaan lebih jauh lagi.■ **Ryan Syair**

DPRD Padang Pariaman Gelar Paripurna RKUA-PPAS

Padang Pariaman, Khazanah-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Arwinsyah dan Bupati Suhatri Bur, Wakil Ketua DPRD Aprinaldi, Wakil Bupati Rahmang dan anggota DPRD, Plt Sekda Ali Amran, para kepala erangkat daerah, pejabat eselon III dan pihak terkait lainnya.

Dalam pandangan umum Fraksi Gerinda sebagai juru bicara Ahmadian mengatakan, pihak eksekutif melahirkan program pembangunan harus mempunyai azas manfaat untuk masyarakat dan daerah.

Pihaknya menyadari pariwisata menjadi sektor utama dalam mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Artinya, sektor pariwisata dapat meningkatkan PAD daerah. Selain itu pemerintah menata kembali kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi kawasan strategis.

Kemudian, Jubir Fraksi Partai Amanat Nasional Erman mengatakan, pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya, dimasukan kembali di anggar tahun 2022 ini.

Selanjutnya Jubir Fraksi PKS Suardi Yuriadi mengatakan, rancangan KUA-PPAS tahun Anggaran 2022 peningkatan anggaran untuk sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yakni pertanian dengan mengoptimalkan lahan sawah teriritasi dan terintegrasi.

Selanjutnya, Jubir Fraksi Demokrat Sudirman Sukur mengatakan, pihak eksekutif dalam pelanggaran harus mengacu pada aturan yang berlaku, agar tidak berbenturan dengan aturan lainya.

Selanjutnya, Jubir Fraksi Golkar mengatakan, perlunya persamaan persepsi antara Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan anggaran tahun 2022 ini. Selain itu, pihak pemerintah agar dapat meningkatkan PAD dari segala sektor.

Selanjutnya, Juru bicara Fraksi PPP Syafruddin mengatakan, pihak eksekutif sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat gempa tahun 2009 lalu.

Selanjutnya, Jurubicara Fraksi Nasdem mengatakan, dengan tingginya dekadensi moral di daerah ini, ia berharap pihak eksekutif memprioritaskan pembangunan Adat Basah di Saran, Sarak Basandi Kitabullah.

Selanjutnya, Jurubicara Fraksi PKB mengatakan, pada hakekatnya pembangunan daerah mengacu pada skalaprioritas untuk masyarakat dan daerah.

Sementara Ketua DPRD Padang Pariaman, Arwinsyah mengatakan, seluruh penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi itu agar menjadi masukan untuk pihak eksekutif.

Selain itu, KUA-PPAS yang dibahas hari ini sebagai rancangan, dan masukan dari masing-masing fraksi itu agar dibahas pada sidang-sidang selanjutnya.■ **Suger**

Redaksi & Bisnis
Khazanah Building, Lantai 2
Jl. Khatib Sulaiman No. 47 Padang
Telp. : 0751-8952249
Email : redaksikhazanah@gmail.com

Harian KHAZANAH Menebar Kebaikan

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | KAMIS, 26 DZULHIJJAH 1442 H | EDISI 629 TAHUN III 2021 | Rp4.500

AKIBAT LEDAKAN DI BEIRUT

Jutaan Orang Hidup dalam Kemiskinan

Beirut, Khazanah - Program Pangan Dunia (World Food Programme/ WFP) mengatakan, pihaknya berencana meningkatkan bantuan makanan dan uang tunai untuk 1,4 juta rakyat Lebanon yang menderita akibat ledakan di pelabuhan Beirut tahun lalu yang menghancurkan perekonomian negara itu.

Lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 6.000 luka-luka ketika ribuan ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Ibu Kota Lebanon, Beirut, meledak 4 Agustus 2020. Perekonomian negara itu terpuruk setelah peristiwa yang digambarkan sebagai bencana besar.

Program Pangan Dunia melaporkan, separuh dari penduduk Lebanon yang berjumlah 6,7 juta orang dan seluruh pengungsi Suriah yang berjumlah 1,5 juta orang, hidup dalam kemiskinan yang parah dan kekurangan makanan.

Juru bicara WFP, Tomson Phiri mengatakan situasinya sangat buruk, sehingga badan pangan itu kini membantu seorang dari enam orang di negara itu.

Sejumlah kendaraan dekat tempat penyimpanan pangan yang rusak saat ledakan di pelabuhan Beirut, Lebanon, 9 April 2021

"Dampak ledakan membuat mata uang lokal melemah dan dampak COVID-19 mengakibatkan lebih banyak orang jatuh dalam kemiskinan dan kerawanan pangan. Daya beli keluarga terus menyusut. Bagi para pengungsi, makanan, obat-obatan, dan sewa rumah menjadi semakin tidak terjangkau," ujar Phiri.

Phiri menambahkan, harga sekeranjang makanan WFP, yang mencakup bahan-bahan pangan pokok, meningkat lima kali lipat sejak awal krisis pada Oktober 2019. Pada waktu itulah kabinet Lebanon mengumumkan kenaikan pajak untuk mengatasi ekonomi yang memburuk, yang memicu protes di seluruh negeri.

Phiri mengatakan WFP memerlukan $100 juta untuk menyediakan makanan dan bantuan dasar di Lebanon hingga akhir tahun. ■ **voa**

Seorang petugas pemadam kebakaran melewati rumah yang terbakar saat Dixie Fire berkobar di Plumas County, California, 24 Juli 2021. (AP Photo)

KEBAKARAN HUTAN CALIFORNIA

15 Ribu Orang Diminta Mengungsi

California, Khazanah - Ribuan petugas pemadam kebakaran telah bersiap untuk berupaya lebih keras mengatasi kebakaran hutan terbesar di California sementara cuaca ekstrem yang berbahaya muncul kembali, mengancam menyulut kobaran api yang kian hebat.

Para petugas dapat menyelamatkan rumah-rumah dan membendung kobaran api yang luas, tetapi peringatan kewaspadaan tinggi dijadwalkan dikeluarkan untuk Rabu sore (4/8) hingga Kamis (5/8) karena kondisi panas dan kering dengan angin berkecepatan hingga 56 kilometer per jam.

Ini dapat mendorong kobaran api melalap kayu, semak-semak dan rumput, khususnya di sisi utara dan timur laut dari kebakaran yang luas

Kebakaran yang disebut "Dixie Fire" itu meluas kobarannya di beberapa tempat pada hari Selasa, mendorong perintah evakuasi tambahan bagi sekitar 15 ribu orang, kata para petugas pemadam.

Para petugas hari Senin (2/8) berhasil mencegah kebakaran menjangkau rumah-rumah di Greenville, sebuah komunitas kecil di California Utara di dekat Hutan Nasional Plumas, sementara kebakaran yang telah berlangsung tiga pekan ini meluas areanya menjadi lebih dari 1.024 kilometer persegi di kabupaten Plumas dan Butte.

Kebakaran ini telah mengancam ribuan rumah dan menghancurkan 67 rumah serta bangunan-bangunan lainnya sejak mulai berkobar pada 14 Juli. Sejauh ini baru 35 persen kebakaran yang berhasil dipadamkan. ■ **voa**

100 Demonstran Didakwa Menghina Raja Thailand

Bangkok, Khazanah - Lebih dari 100 pengunjuk rasa didakwa berdasar unda/ ng-undang penghinaan terhadap kerajaan Thailand sejak Juli lalu, ketika demonstrasi di seluruh negara itu mulai menuntut reformasi monarki yang tidak tergoyahkan.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pengacara yang mewakili para aktivis dan menunjukkan jumlah yang didakwa kepada kantor berita AFP, Selasa (3/8).

Sebuah gerakan yang sebagian besar dipimpin oleh pemuda dimulai musim panas lalu, didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha, mantan kepala militer yang pertama kali berkuasa, hasil dari kudeta 2014.

Setahun sejak protes dimulai, 110 pengunjuk rasa telah didakwa berdasar undang-undang lese majeste atas peran mereka dalam gerakan itu, yang menyerukan agar Prayut mundur dan protes untuk mereformasi kerajaan. Pada puncaknya, protes menarik puluhan ribu orang turun ke jalan.

Pemimpin terkemuka Parit Chiwarak yang lebih dikenal sebagai "Penguin" memegang rekor sekitar 20 dakwaan, sementara setidaknya delapan pemrotes lainnya - semua berusia di bawah 18 tahun - juga menghadapi dakwaan.

Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman tiga hingga 15 tahun penjara per dakwaan. ■ **voa**

Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke arah demonstran anti-pemerintah di Bangkok, Thailand, Minggu, 18 Juli 2021